



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah menyusun *road map* reformasi birokrasi di internal instansi serta menjalankan program mikro mengacu pada *road map* reformasi birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat maka reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Binjai perlu segera dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Binjai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang Birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
8. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

9. *Road Map*.....

9. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
10. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
11. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu Program dalam Reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2024 bertujuan untuk menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih sekaligus menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2024.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2024 disusun untuk mencapai tiga (3) sasaran utama yaitu:

- a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. birokrasi yang efisien dan efektif; dan
- c. birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan mindset dan budaya kerja;
 - b. deregulasi kebijakan;
 - c. penyederhanaan organisasi;
 - d. perbaikan tata laksana;
 - e. penataan sumber daya manusia aparatur;
 - f. penguatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran;
 - g. penguatan pengawasan; dan
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (3) Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, disusun berdasarkan program.

BAB IV.....

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi terdiri Pemerintah Daerah terdiri dari :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2017-2021;
 - BAB III : ANALIS LINGKUNGAN STRATEGIS;
 - BAB IV : SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024;
 - BAB V : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI;
 - BAB VI : PENUTUP.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2022-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2022-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA BINJAI TAHUN 2022-2024

BAB I
PENDAHULUAN

.....

BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
2017-2021

.....

BAB III
ANALIS LINGKUNGAN STRATEGIS

.....

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
2022-2024

.....

BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI

.....

BAB VI
PENUTUP

.....

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2022-2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Binjai merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki Birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga Birokrasi Pemerintah Kota Binjai memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemeritahan daerah, serta meningkatkan kinerja.

Sebagai langkah lanjutan dari pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi di Kota Binjai, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi periode ketiga tahun 2022-2024. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan dan kelanjutan dari agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, yang telah dimulai sejak tahun 2017–2021. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai adalah untuk upaya penguatan dan peningkatan capaian yang telah ada serta memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu: menciptakan Birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kota Binjai dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang akan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya perubahan berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara.....

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai berisi uraian mengenai gambaran kondisi birokrasi Pemerintah Kota Binjai saat ini, kondisi birokrasi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi, agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Dengan demikian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Proses Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai 2017-2021 sebagai periode awal Reformasi Birokrasi, telah menetapkan prioritas untuk mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hal tersebut diikuti dengan menetapkan arah kebijakan pembangunan kedepan kepada pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional, berkompetensi dan memiliki integritas, mewujudkan penegakan hukum dan penertiban keamanan, peningkatan kehidupan beragama melalui penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama, serta mendorong terwujudnya otonomi pemerintahan daerah;

Selain itu, agenda prioritas Reformasi Birokrasi periode sebelumnya (2017-2021) adalah membangun sumber daya manusia berkualitas (*Smart People*) dengan kualifikasi Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Binjai yang unggul dan mandiri, sehat, cerdas, berkompetensi tinggi dan berdaya saing, serta memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Penguasaan IPTEK dan Pengamalan IMTAQ). Prioritas ini diikuti dengan arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan sarana dan kualitas pelayanan kesehatan, pembinaan keterampilan untuk bekal hidup (*skill living*) serta penyaluran bakat olahraga dan seni budaya generasi muda, untuk terciptanya manusia yang sehat jasmani dan rohani, berkarakter dan menjunjung tinggi norma, adat dan budaya.

Peta Arah Reformasi Birokrasi (*Road Map* Reformasi Birokrasi) periode ketiga (2022-2024) ini disusun untuk membantu Pemerintah Kota Binjai dalam menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026) Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tentang Reformasi Birokrasi, kelanjutan dari *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2017-2021 sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam.....

dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi pada instansi masing-masing.

Road Map juga menjadi petunjuk mewujudkan Birokrasi yang akuntabel, efisien dan efektif yang selaras dengan yang ditetapkan dalam Misi ke 1 (satu) yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional dan Misi ke 3 (tiga) yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas (RPJMD: 2021-2026). Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi.

Hal ini jelas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa kecepatan melayani serta Birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi dapat mendorong setiap lembaga/pemerintahan daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik.

Road Map Reformasi Birokrasi bermanfaat untuk memberikan panduan bagi seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk memahami semua aspek yang harus dibenahi secara bertahap, terukur dan dilaksanakan secara profesional dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Road Map* akan memandu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dalam mewujudkan Perangkat Daerah yang bersih dan akuntabel, bekerja dengan efisien dan efektif serta mampu menjadi pemberi layanan pemerintahan dengan prima. *Road Map* bermanfaat memberi penjelasan teknis semua indikator yang menjadi tolak ukur sebuah pelaksanaan kewenangan yang sesuai sasaran Reformasi Birokrasi dan menjadikan Perangkat Daerah mampu melihat secara utuh semua unsur yang mengungkit keberhasilan dan dampak serta hasil yang diharapkan. *Road Map* akan memandu Perangkat Daerah membuat rencana aksi dan rencana kerja Reformasi Birokrasi atas sasaran dan kebijakan serta strategi yang akan dipilih dalam menuangkan program kegiatan unggulan.

Perumusan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai untuk periode 2022-2024 didapatkan dari proses berpikir logis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi dari berbagai

universitas.....

universitas, praktisi, pengusaha, birokrat, dan masyarakat dengan berdasarkan dua pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya (evaluasi

pencapaian Reformasi Birokrasi 2017-2021 dan hasil Analisis Lingkungan Strategis). Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga

diformulasikan secara lebih riil dalam menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis hingga level teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah terutama Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Daerah, dan unsur di luar pemerintahan seperti Dinas / Badan selaku instansi pembina, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan politisi. Kerangka penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 1.1
ALUR PROSES PENYUSUNAN ROAD MAP RB 2022-2024



Dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Binjai periode 2022-2024 sebagai periode terakhir menuju Birokrasi berkelas dunia dan untuk tujuan percepatan hasil yang lebih baik, digunakan pendekatan baru yaitu:

1. Strategi lebih implementatif, dengan mempertajam penyusunan aktivitas dalam rencana aksi dan rencana kerja Reformasi Birokrasi Unit (Perangkat Daerah) yang sesuai dan menjawab permasalahan dan memiliki *output* yang mampu mengungkit tercapainya sasaran Reformasi Birokrasi pada delapan area perubahan.
2. Lebih melibatkan banyak pihak (vertikal dan horizontal). Bahwa dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, merupakan bentuk tindakan kerjasama dari setiap pemangku kewenangan. Kendala saat ini dalam pelaksanaan, peran komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah dan Kepala Daerah dan partisipasi setiap level manajemen masih belum optimal.
3. Program.....
3. Program dan kegiatan didesain sampai ke unit kerja. Mencermati hasil Reformasi pada dua periode sebelumnya (2017-2021) ditemukan bahwa

kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi diantaranya ketidakikutsertaan secara maksimal semua elemen organisasi.

B. ASAS PENYUSUNAN RMRB

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai 2022-2024 mengedepankan asas Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Akar masalah dimaksud mencakup permasalahan utama yang menjadi penghambat tercapainya target maksimal dari semua komponen Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya menjadi penyebab tidak atau terganggunya capaian sasaran Reformasi Birokrasi. Akar masalah adalah penyebab utama yang ditemukan dari hasil evaluasi per komponen dalam lembar kerja evaluasi periode 2017-2021 (2021 sebagai *base line*). Akar masalah dikelompokkan dalam segmen gangguan kinerja birokrasi yang bersih, gangguan kinerja birokrasi efisien dan efektif dan gangguan kinerja pelayan publik.

Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Prioritas dipilih berdasarkan urgensi akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap kegagalan dan masalah lainnya. Prioritas ditentukan dari upaya utama menanggulangi gangguan terhadap birokrasi akuntabel, birokrasi efisien / efektif dan pelayanan publik yang prima. Prioritas berarti menetapkan rencana kerja dan rencana aksi / tindakan yang mampu mengungkit faktor keberhasilan pada area perubahan yang menjadi tolok ukur capaian sasaran Reformasi Birokrasi.

Selain itu, guna meningkatkan kualitas *Road Map* ini dibandingkan dengan *Road Map* sebelumnya, terdapat setidaknya tiga hal yang diperbaharui. Pertama, *Road Map* ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dan lebih terukur dalam pemetaan setiap kekurangan dari capaian periode sebelumnya yang berguna dalam menetapkan strategi dan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja Reformasi Birokrasi tahunan yang lebih baik.

Kedua, rencana kerja dan rencana aksi tahunan pada unit kerja (Perangkat Daerah) dituangkan secara detail dan berbeda pada tiap unit sesuai capaian dari hasil evaluasi Lembar Kerja Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Binjai.

Ketiga.....

Ketiga, analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh.

C. PERUBAHAN PARADIGMA

Mencermati sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Binjai 2021-2024, paradigma yang digunakan masih mengikuti konsep *New Publik Management* (NPM) dengan titik fokus pembenahan menuju tata birokrasi yang efektif, efisien, berorientasi pada hasil. Selain mengacu pada paradigma NPM, Reformasi Birokrasi mengarah pada konsep *New Publik Service* (NPS) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar Pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Pendekatan *Government to Government* (Go to G), *Government to Business* (G to B) dan *Government to Community* (G to C). Meskipun demikian, pada beberapa kondisi Indonesia masih menerapkan beberapa praktik birokrasi *weberian*, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara.

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa saat ini di Indonesia, ketiga paradigma berjalan secara paralel dan digunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya. Tentunya, apapun paradigma yang digunakan, hasil yang ingin diwujudkan adalah birokrasi yang berkelas dunia.

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2017- 2021

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai 2022-2024 ini dibangun dari hasil evaluasi pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2017-2021 dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang dihadapi kedepan. Evaluasi capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode kedua, akan membantu meletakkan arah kebijakan yang akan digunakan untuk dipedomani dan dijadikan dasar perumusan kebijakan pada periode ketiga (2022-2024). Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi memuat beberapa bahasan yang menjadi dasar penyusunan *Road Map* serta hasil dan dampak yang ditimbulkan selama pelaksanaan periode kedua. Cakupan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode kedua (2017-2021) mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 mencakup aspek sebagaimana termuat dalam gambar dibawah ini :

GAMBAR 2.1
CAKUPAN EVALUASI PELAKSANAAN RB 2017-2021

01	02	03	04
KEBIJAKAN	AREA DAN IMPLEMENTASI	DAMPAK	TANTANGAN
CAKUPAN	CAKUPAN	CAKUPAN	CAKUPAN
1. KEBIJAKAN REF BIROKRASI	1. AREA PERUBAHAN RB 2. IMPLEMENTASI PROGRAM RB	DAMPAK HASIL KEBIJAKAN	TANTANGAN DAN HAMBATAN

A. ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI 2017 - 2021

Berdasarkan dokumen dan Data Pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode kedua, (2017-2021) dan mempedomani arah pembangunan birokrasi sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 telah membawa beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah terukur ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi periode selanjutnya. Beberapa aspek mengalami perbaikan dan peningkatan, namun beberapa aspek pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Binjai belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Aspek.....

Aspek yang ditinjau dapat dikemukakan dalam banyak dimensi. Melihat kinerja pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2017-2021, selain dilihat dari capaian sesuai komponen pengungkit dan hasil, juga dapat dilihat dari dimensi capaian sasaran Reformasi Birokrasi. Ukuran kinerja birokrasi yang akuntabel, efisien / efektif serta tingkat pelayanan publik jauh lebih memberikan informasi yang relevan dalam menentukan sejauh mana keberhasilan dan tingkat capaian Reformasi Birokrasi. Dan dapat membantu meletakkan dasar yang kuat dalam rancangan *Road Map 2022-2024*.

Arah kebijakan Reformasi Birokrasi 2017-2021 sesuai RPJMD 2016-2021 diarahkan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Binjai dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data.

Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) maupun tingkat *leveling* kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di Kota Binjai. Peningkatan reformasi dan birokrasi termasuk didalamnya adalah peningkatan pelayanan publik melalui penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu (*Smart City*); pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas.

Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi akan dijawab melalui Misi I RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Tujuan yang ingin dicapai adalah Menciptakan tata kelola pemerintahan Kota Binjai yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan sasaran sebagai berikut: 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik; 3) Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan.

Hasil.....

Hasil capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021 (*base line*) menjadi dasar untuk memperbaiki dan meletakkan arah yang benar dalam kebijakan pembangunan yang mampu memperkuat birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani dengan prima. Melanjutkan pencapaian periode pertama dan memperbaiki kelemahan dan kendala yang terjadi pada periode pertama merupakan arah kebijakan *Road Map* Reformasi Birokrasi periode kedua. Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi periode kedua (2017-2021), Pemerintah Kota Binjai memfokuskan pembenahan pada 6 (Enam) area prioritas yaitu :

1. Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah terletak pada 8 (delapan) area perubahan.
2. Prioritas yang harus terus dipelihara /dipertahankan.
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat *leveling* kapabilitas APIP,
4. Prioritas yang terkait peningkatan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
5. Prioritas yang terkait peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Prioritas Pengembangan dan implementasi Zona Integritas yang selaras dengan upaya tercapainya sistem pemerintahan yang bersih.

A.1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah 2017-2021.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembenahan manajemen Pemerintah berada pada 8 (delapan) area perubahan yaitu :

1. Mental aparatur dan Manajemen Perubahan yang menyangkut pola pikir dan budaya kerja pegawai Pemerintah Kota Binjai yang terwujud dalam peningkatan profesional pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN.
2. Perbaiki sistem perumusan dan penataan regulasi dengan memprioritaskan keselarasan regulasi yang ada dan merupakan produk hukum daerah dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian/Pemerintah Pusat.
3. Perbaiki dan Penyederhanaan Kelembagaan dan penataan organisasi melalui kepatuhan dalam perampingan dan penyederhanaan struktur kelembagaan yang beorientasi pada kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

4. Perbaiki.....

4. Perbaiki ketatalaksanaan yang menitikberatkan pada pemenuhan standar dan prosedur kerja yang baku dan dukungan sistem informasi pelayanan yang memadai sehingga diharapkan mampu mendukung capaian kinerja Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
5. Perbaiki Pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kecukupan kompetensi dan disiplin kerja.
6. Perbaiki Sistem akuntabilitas melalui penataan sistem capaian kinerja dan perbaikan peringkat Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai sekaligus mendukung capaian opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai
7. Perbaiki Sistem Pengawasan dengan memprioritaskan penguatan zona integritas, anti gratifikasi dan pemetaan risiko secara andal.
8. Perbaiki sistem dan kualitas pelayanan publik melalui perwujudan *smart city* dengan mengutamakan sistem pelayanan yang terjangkau, mudah diakses, akuntabel dan transparan.

A.2. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara /Dipertahankan.

Prioritas yang harus terus dipelihara merupakan keberhasilan yang sudah dicapai atau prestasi yang sudah diraih oleh Pemerintah Kota. Berikut hal-hal yang telah dicapai untuk dapat terus dipelihara/dipertahankan. Berikut uraian prioritas yang harus terus dipelihara antara lain :

A.2.1	Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas KKN	
	a	Peningkatan opini dari BPK
	b	Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan OPD/Unit Kerja untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
	c	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	d	Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Sumber data : RMRB 2017-2021

A.2.2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	
	a	Pengembangan <i>e-government</i> khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (<i>e-planning, e-budgeting</i>) / SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, dan Penganggaran).
	b	Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Binjai

c. Kualitas.....

	c	Kualitas penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
	d	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
	e	Tersedianya sarana Pengadaan untuk penyampaian Informasi yang diindikasikan terjadinya KKN

Sumber data : RMRB 2017-2021

A.2.2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	a	Pelayanan kesehatan prima dengan terakritisasinya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
	b	Pelayanan perizinan terfokus pada satu pintu dengan sistem <i>online</i> (e-perizinan).
	c	Tersedianya bus perpustakaan keliling yang mengakses pada tingkat desa dan disekolah-sekolah.
	d	Jaringan internet sebagai pendukung terselenggaranya pelayanan publik

Sumber data : RMRB 2017-2021

A.3. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Internal.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama	Perbaiki kualitas <i>maturity</i> Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut:	
	A	Penguatan Lingkungan pengendalian melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, gaya kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang tepat fungsi, adanya pendelegasian wewenang yang sehat, tersedianya prosedur pembinaan Sumber daya manusia secara terukur dan terarah, penguatan peran APIP yang profesional serta koordinasi kelembagaan yang baik.
	B	Pelaksanaan identifikasi risiko dan penilaian risiko secara terukur dan dilakukan sesuai prosedur dan metodologi yang baku
	C	Penataan Kegiatan Pengendalian melalui upaya-upaya reuiu atas kinerja, pemberdayaan SDM, pengelolaan sistem informasi, pengendalian atas aset, reuiu atas capaian dan indikator kinerja dan sistem panataan dokumen kinerja yang baik.
	D	Penataan sistem komunikasi dan informasi risiko melalui pengembangan cara cara komunikasi yang efektif antar lini dan antar kelembagaan serta upaya pengelolaan informasi yang tepat guna dan berdaya guna (relevan)

E Pelaksanaan.....

	E	Pelaksanaan Pemantauan secara terpisah melalui evaluasi dan berkelanjutan
Kedua	Quick Wins. Melakukan langkah cepat dan efektif dalam penguatan sistem pengendalian intern guna menghasilkan kepatuhan pada prosedur dan kesiapan dalam pelaksanaan manajemen risiko pada seluruh Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemko Binjai	

A.4. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Integritas Dan Kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Prioritas ini menyangkut 1 (satu) fokus, yaitu:

Pertama	Perbaiki Sistem dan tata cara pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang unggul mendukung terwujudnya <i>smart city</i> dengan langkah dan upaya sebagai berikut:	
	A	Pemenuhan prosedur pengukuran kinerja yang terpadu dan terukur dari aparatur menyesuaikan target <i>output</i> yang ditetapkan.
	B	Mendukung terlaksananya evaluasi jabatan secara reguler dengan mengutamakan proses yang akuntabel sesuai regulasi
	C	Pemetaan kompetensi aparatur secara berkala untuk memperoleh informasi dan formasi yang akuntabel dalam penempatan aparatur.
	D	Penegakan sanksi atas pelanggaran disiplin secara tegas dan mendukung pemberian penghargaan atas capaian kinerja aparatur
	E	Memetakan kebutuhan dan formasi aparatur secara berkala demi mendapatkan jumlah dan kualifikasi aparatur yang baik dan dapat berkontribusi dalam kinerja birokrasi
	F	Pelaksanaan penyetaraan jabatan yang berorientasi pada keseimbangan beban kerja dan kesesuaian fungsi teknis unit kerja
	G	Pemetaan minat dan kompetensi aparatur secara reguler guna mendapatkan data dasar kebutuhan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan kerja.

A.5. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pengendalian Keuangan Dan Aset

Prioritas ini menyangkut 1 (satu) fokus, yaitu:

Pertama	Perbaiki Sistem dan tata cara pengelolaan keuangan dan aset dengan langkah dan upaya sebagai berikut:	
	A	Penyediaan regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset.
	B	Penyediaan dan pemanfaatan sistem informasi terpadu tata kelola keuangan dan aset

C Pelaksanaan.....

	C	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi berkala capaian tata kelola keuangan dan aset guna mendukung akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja organisasi dan pemerintah daerah
	D	Penyediaan program pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pelaksana tata kelola keuangan dan aset
	E	Peningkatan kualitas koordinasi dan dukungan perangkat daerah dalam pemenuhan data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset guna pemenuhan kualitas laporan keuangan dan kinerja

A.6. Pengembangan Dan Implementasi Zona Integritas Yang Selaras Dengan Upaya Tercapaiannya Sistem Pemerintahan Yang Bersih

Sebagai wujud niat/komitmen untuk memberantas korupsi atau mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, maka untuk tahun pertama akan ditetapkan OPD sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai. OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM diharapkan dapat menjadi contoh OPD lainnya sebagai OPD yang betul-betul bebas korupsi dan menjadi OPD yang bersih dan melayani. Dan untuk tahun-tahun berikutnya akan dikembangkan/diperluas dengan menetapkan OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Binjai sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

B. CAPAIAN IMPLEMENTASI 2017 - 2021

1. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 2021

Sebagai bagian dari dasar penetapan strategi dan kebijakan agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2022-2024, berikut dikemukakan capaian pelaksanaan dari hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat

PMPRB.....

PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penilaian mandiri melalui Lembar Kerja Evaluasi bertujuan untuk mengukur hubungan yang akurat antara *Road Map* dan hasil pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi, serta membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan evaluasi secara mandiri agar diketahui kelemahan yang harus diperbaiki.

Tujuan lainnya dari pelaksanaan penilaian mandiri adalah alat *monitoring* dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya serta untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun berikutnya.

Berikut ini disajikan hasil capaian Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tahun 2021 (sebagai dasar *base line*) pada Pemerintah Kota Binjai.

a. Capaian Komponen Pengungkit / Aspek Pemenuhan

Komponen pengungkit merupakan salah satu komponen utama dalam mengukur capaian pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi pada Pemerintah daerah dan perangkat daerah. Komponen pengungkit merupakan parameter yang mendorong dan memicu tersedianya, terlaksananya dan terhasilkannya *output* 8 (delapan) area perubahan dalam agenda Reformasi Birokrasi. Aspek pemenuhan merupakan parameter untuk mengukur ketersediaan semua pemicu/pendorong dalam menggerakkan dan menghasilkan hasil antara.

1) Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola kerja, budaya kerja individu maupun unit kerja menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi

Kebijakan dan strategi yang telah ditempuh selama kurun waktu sampai dengan Tahun 2021, Pemerintah Kota Binjai telah melakukan internalisasi atas perubahan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), membangun karakter dan budaya kinerja lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat.

Pemerintah.....

Pemerintah Kota Binjai juga memiliki arah kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir.

Berikut data Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian mandiri untuk Aspek Manajemen Perubahan.

TABEL 2.1
CAPAIAN ASPEK MANAJEMEN PERUBAHAN TAHUN 2021

PENILAIAN		BOBOT	NILAI
MANAJEMEN PERUBAHAN		2.00	1.09
1	Tim Reformasi Birokrasi	0.40	0.30
2	Road Map Reformasi Birokrasi	0.40	0.21
3	Pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi	0.80	0.37
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	0.40	0.21
<p>Analisa : Belum tercapainya bobot maksimal dari komponen pengungkit pada aspek manajemen perubahan disebabkan capaian sub aspek pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi, efektivitas tim Reformasi Birokrasi, ketersediaan <i>Road Map</i> dan perubahan pola pikir belum terlaksana secara optimal terutama disebabkan kinerja pelaksanaan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang dibentuk Melalui Keputusan Walikota Binjai belum optimal.</p>			

Sumber data : LKE Pemkot Binjai 2021

2) Deregulasi Kebijakan

Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundangan yang dihasilkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD ataupun oleh Kepala Daerah dalam mendukung sasaran RB. Dalam *Road Map* ini deregulasi kebijakan juga dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan, untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan Birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.

Kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Binjai dalam Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2021 mencakup pemetaan dan penataan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Binjai.....

Binjai yang disharmonis dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain.
Berikut data capaian aspek deregulasi kebijakan pada komponen pengungkit tahun 2021.

TABEL 2.2
CAPAIAN ASPEK DEREGULASI KEBIJAKAN TAHUN 2021

PENILAIAN		BOBOT	NILAI
DEREGULASI KEBIJAKAN		2.00	0.94
1	Harmonisasi	1.00	0.35
2	Sistem Pengendalian dalam penyusunan perundangan undangan	1.00	0.59
Analisa : Belum tercapainya bobot maksimal dari komponen pengungkit pada aspek deregulasi kebijakan disebabkan capaian sub aspek harmonisasi dan sistem pengendalian perumusan kebijakan belum terlaksana secara optimal terutama disebabkan belum ditaati dan dilaksanakan prosedur pelaksanaan harmonisasi perundangan dan model pengendalian perumusan perundangan pada level perangkat daerah secara optimal.			

Sumber data : LKE Pemkot Binjai 2021

3) Penataan dan Penguatan Organisasi

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat daerah secara proporsional sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah menuju tepat fungsi dan tepat ukuran.

Kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Binjai dalam penataan dan penguatan organisasi sampai dengan tahun 2021 meliputi evaluasi terhadap Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan tugas fungsi serta melaksanakan restrukturisasi organisasi sesuai ketentuan

Berikut data capaian aspek penataan dan penguatan organisasi pada komponen pengungkit tahun 2021.

TABEL 2.3.....

TABEL 2.3
CAPAIAN ASPEK PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI TAHUN 2021

PENILAIAN		BOBOT	NILAI
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		2.00	2.01
1	Penataan Organisasi	1.00	0.60
2	Evaluasi Kelembagaan	1.00	0.64
3	Tindak Lanjut Evaluasi	1.00	0.78
Analisa : Belum tercapainya bobot maksimal dari komponen pengungkit pada penataan dan penguatan organisasi disebabkan capaian semua sub aspek belum terlaksana secara optimal pada level perangkat daerah dan disebabkan upaya yang belum maksimal dari penanggungjawab penataan dan dukungan perangkat daerah yang masih lemah.			

Sumber data : LKE Pemkot Binjai 2021

4)	Penataan Tata Laksana
<p>Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing organisasi perangkat daerah</p> <p>Kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Binjai dalam penataan Tata Laksana sampai dengan tahun 2021 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan penyediaan standar prosedur kerja khususnya bagi perangkat daerah pelayanan publik • Optimalisasi keterbukaan informasi publik • Pembukaan akses internet baru <p>Berikut data capaian aspek penataan Tata Laksana pada komponen pengungkit tahun 2021.</p>	

TABEL 2.4
CAPAIAN ASPEK PENATAAN TATA LAKSANA TAHUN 2021

PENILAIAN		BOBOT	NILAI
PENATAAN DAN TATA LAKSANA		2.50	1.55
1	Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur	0.50	0.18
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.50	0.98
3	Keterbukaan Informasi Publik	0.50	0.39
Analisa : Belum tercapainya bobot optimal dari komponen pengungkit pada penataan dan penguatan organisasi disebabkan capaian sub aspek penyediaan proses bisnis dan prosedur kerja serta keterbukaan informasi publik masih belum optimal pada level Pemerintah Kota dan level unit.			

Sumber data : LKE Pemkot Binjai 2021

5. Penataan.....

5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
 Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Binjai dalam penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia sampai dengan tahun 2021 meliputi :

- Penyediaan dan implementasi analisa jabatan dan beban kerja
- Penerapan sistem penilaian kinerja individu
- Perencanaan kebutuhan berbasis beban kerja dan kompetensi
- Penegakan etika Birokrasi
- Penilaian disiplin dan prestasi PNS.

Berikut data capaian aspek penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada komponen pengungkit tahun 2021.

TABEL 2.5
CAPAIAN ASPEK PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2021

PENILAIAN		BOBOT	NILAI
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		3.00	2.37
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0.20	0.17
2	Proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	0.40	0.40
3	Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	0.20	0.08
4	Promosi jabatan secara terbuka	1.20	1.04
5	Penetapan Kinerja individu	0.40	0.22
6	Penetapan aturan disiplin, kode etik dan perilaku pegawai	0.20	0.12
7	Pelaksanaan evaluasi jabatan	0.20	0.13
8	Sistem Informasi Kepegawaian	0.20	0.20
Analisa : Belum Tercapainya bobot optimal dari komponen pengungkit pada penataan sistem manajemen sumber daya manusia disebabkan capaian sub aspek pengembangan kompetensi, penegakan disiplin, dan evaluasi jabatan masih belum sesuai harapan dan belum mampu memberikan dukungan capaian bobot optimal pada level Pemerintah Kota dan level unit.			

Sumber data : LKE Pemkot Binjai 2021

6. Penguatan.....

6) Penguatan Akuntabilitas

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Binjai dalam penguatan akuntabilitas sampai dengan tahun 2021 meliputi :

- Reviu kesesuaian visi misi pada dokumen rencana strategis Pemerintah daerah dan perangkat daerah
- Penyempurnaan sasaran strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja
- Peningkatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- *Monitoring* dan evaluasi program/kegiatan pendukung akuntabilitas
- Tindak lanjut perbaikan hasil *monitoring* akuntabilitas

Berikut data capaian aspek penguatan akuntabilitas pada komponen pengungkit tahun 2021.

TABEL 2.6
CAPAIAN ASPEK PENGUATAN AKUNTABILITAS TAHUN 2021

PENILAIAN		BOBOT	NILAI
PENGUATAN AKUNTABILITAS		2.50	1.79
1	Keterlibatan Pimpinan	1.00	0.87
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1.50	0.92
Analisa : Belum tercapainya bobot optimal dari komponen pengungkit pada penguatan akuntabilitas disebabkan capaian semua sub aspek masih perlu ditingkatkan pada level Pemerintah Kota dan level unit. Komitmen pimpinan organisasi dan Kepala Daerah sangat fundamental dalam pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi.			

Sumber data : LKE Pemkot Binjai 2021

7) Penguatan Pengawasan

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi Pemerintah serta membentuk APIP yang kapabel dalam menunjang peran fungsi pengawasan.

Kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Binjai dalam penguatan pengawasan sampai dengan tahun 2021 meliputi :

- Menyusun.....

- Menyusun rencana kebutuhan tenaga Auditor dan PPUPD
- Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP
- Penerapan SPIP
- Penyusunan rencana *monitoring* pengelolaan keuangan seluruh perangkat daerah
- Pelaksanaan *monitoring* pengelolaan keuangan OPD
- Asistensi penyusunan LHKPN pejabat
- Penyusunan rencana pengembangan sarana aduan indikasi KKN
- Penerapan sarana aduan indikasi KKN
- Tindak lanjut aduan terkait indikasi KKN

Berikut data capaian aspek penguatan pengawasan pada komponen pengungkit tahun 2021.

TABEL 2.7
CAPAIAN ASPEK PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2021

PENILAIAN		BOBOT	NILAI
PENGUATAN PENGAWASAN		2.50	1.41
1	Gratifikasi	0.30	0.21
2	Penerapan SPIP	0.30	0.18
3	Pengaduan Masyarakat	0.50	0.40
4	<i>Whistle Blowing System</i>	0.30	0.12
5	Penanganan Benturan Kepentingan	0.30	0.10
6	Pembangunan Zona Integritas	0.50	0.13
7	Aparat Pengawas Intern Pemerintah	0.30	0.28
Analisa : Belum tercapainya bobot optimal dari komponen pengungkit pada penguatan pengawasan disebabkan capaian semua sub aspek belum memadai dan mampu memberikan dukungan capaian bobot optimal pada level Pemerintah Kota dan level unit.			

Sumber data : LKE Pemkot Binjai 2021

8) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Bertujuan untuk kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi Pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat melalui tata kelola aduan yang baik, mudah, dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan prosedur yang memadai. Kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Binjai dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sampai dengan tahun 2021 meliputi :

- Sosialisasi.....

- Sosialisasi standar pelayanan publik kepada OPD
- Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada OPD pelayanan
- Evaluasi kinerja pelayanan publik
- Optimalisasi pengelolaan aduan

Berikut data capaian aspek peningkatan kualitas pelayanan publik pada komponen pengungkit tahun 2021.

TABEL 2.8
CAPAIAN ASPEK PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021

PENILAIAN		BOBOT	NILAI
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		2.50	1.20
1	Standar Pelayanan	0.40	0.28
2	Budaya Pelayanan Prima	0.40	0.15
3	Pengelolaan Pengaduan	0.60	0.29
4	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	0.70	0.26
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.40	0.22
Analisa : Belum tercapainya bobot optimal dari komponen pengungkit pada peningkatan kualitas pelayanan publik disebabkan capaian semua sub aspek belum memadai dan mampu memberikan dukungan capaian bobot optimal pada level unit.			

Sumber data : LKE Pemkot Binjai 2021

b. Capaian Komponen Hasil Antara

Hasil antara merupakan bagian dari komponen pengungkit yang berfungsi untuk mengukur dan mengetahui keberhasilan yang telah dicapai pada aspek pemenuhan terhadap 8 (delapan) area perubahan dan diharapkan memberi dampak dan pengaruh atas keberhasilan tercapainya komponen hasil.

Hasil antara menjadi bagian dari capaian Pemerintah Kota Binjai yang dihasilkan dengan berfungsinya semua area perubahan dalam komponen pemenuhan dan menjadi penghubung tercapainya komponen hasil.

Hasil antara bukan merupakan alat ukur capaian pada level unit dan hanya merupakan capaian yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Binjai. Berikut ini adalah hasil antara Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Binjai tahun 2021 (*base line*).

TABEL 2.9.....

TABEL 2.9
CAPAIAN KOMPONEN HASIL ANTARA

NO	PARAMETER HASIL ANTARA	BOBOT	NILAI
1.	Sistem Merit	1.00	0.22
2.	Kualitas Kebijakan		0.40
3.	Kualitas Pengelolaan Aset	1.00	0.00
4.	Aparatur Sipil Negara yang Profesional	1.00	0.44
5.	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.00	0.33
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	0.66
7.	Kualitas Pengelolaan Anggaran		0.71
8.	Kualitas Pelayanan Publik	1.00	0.60
9.	Kapabilitas APIP	1.00	0.56
10	Maturitas SPIP	1.00	0.34
11	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	1.00	0.62
12	Kualitas Pengelolaan Arsip	1.00	0.44
<p>Analisa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dari 12 (dua belas) unsur parameter yang dilaporkan dalam Lembar kerja evaluasi Pemkot Binjai 2021, tidak ada parameter yang memenuhi bobot maksimal dan satu diantaranya merupakan parameter pengelolaan aset yang belum terlaksana sehingga tidak memiliki angka capaian • Bahwa unsur parameter yang ditetapkan dalam lembar kerja evaluasi sesuai Permenpan Nomor 26 tahun 2020, hanya memuat sepuluh parameter hasil antara. • Bahwa dalam lembar kerja evaluasi yang tidak memuat bobot sebagaimana ditetapkan dalam permenpan RB No 26 tahun 2020, tidak disajikan dalam tabel diatas. 			

Sumber data : LKE Pemkot Binjai 2021

c. Capaian Komponen Hasil Reform

Reform merupakan satu dari aspek dalam komponen pengungkit yang dapat diartikan sebagai kondisi perubahan yang terjadi sebagai dampak dari upaya-upaya perbaikan dan peningkatan yang dilakukan dan mengubah keadaan awal menjadi lebih baik.

Dalam Reformasi Birokrasi, aspek reform pada komponen pengungkit merupakan kondisi perubahan yang diharapkan terjadi akibat dari upaya perbaikan dan penguatan serta penataan 8 (delapan) area perubahan menjadi lebih baik dibanding kondisi awal/sebelumnya pada Pemerintah Daerah dan Pada Perangkat Daerah.

TABEL 2.10.....

TABEL 2.10
CAPAIAN KOMPONEN PENGUNGKIT / ASPEK REFORM
PADA TAHUN 2021

NO.	PARAMETER HASIL ANTARA	BOBOT	NILAI	%
1.	Manajemen Perubahan	3.00	2.00	0.67
2.	Deregulasi Kebijakan	3.00	2.16	0.72
3.	Penataan Dan Penguatan Organisasi	4.50	2.74	0.61
4.	Penataan Tata Laksana	3.75	1.83	0.49
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	4.50	2.73	0.67
6.	Penguatan Akuntabilitas	3.75	13.81	3.68
7.	Penguatan Pengawasan	3.75	3.00	0.8
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	2.79	0.74

Analisa :

- Bahwa dari 8 (delapan) unsur parameter aspek reform yang dilaporkan dalam Lembar kerja evaluasi Pemkot Binjai 2021, hanya dua parameter yang memenuhi bobot >0.70 dari total bobot masing-masing dan sisanya masih butuh adanya upaya peningkatan dan penataan. Namun dari semua parameter tersebut diatas, penyebab tidak terpenuhinya bobot maksimal disebabkan capaian aspek reform pada level unit masih belum optimal.
- Masih perlu diupayakan perbaikan perbaikan dan penguatan aspek reform pada semua Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai sampel pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sumber data : LKE Pemkot Binjai 2021

TABEL 2.11
CAPAIAN KOMPONEN PENGUNGKIT /ASPEK REFORM
PADA TAHUN 2021

NO.	PARAMETER HASIL ANTARA	BOBOT	PUSAT	UNIT
1.	Manajemen Perubahan	3.00	2.54	1.46
2.	Deregulasi Kebijakan	3.00	2.50	0.83
3.	Penataan Dan Penguatan Organisasi	4.50	2.55	0.98
4.	Penataan Tata Laksana	3.75	1.96	1.71
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	4.50	2.19	1.33
6.	Penguatan Akuntabilitas	3.75		1.68
7.	Penguatan Pengawasan	3.75	3.15	1.64
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	3.50	2.09

Analisa.....

Analisa :

- Sesuai makna aspek reform, maka hasil diatas menunjukkan belum terimplementasikan dan belum berhasil terwujudnya perubahan dan perbaikan kinerja sebagai akibat berjalannya agenda Reformasi Birokrasi.
- Penyebab rendahnya capaian aspek reform pada level unit dapat disebabkan adanya resistensi dan kurangnya komitmen segenap unsur organisasi dalam pemenuhan agenda Reformasi Birokrasi
- Rendahnya capaian aspek reform pada level unit secara umum disebabkan adanya beberapa sub aspek yang belum dilaksanakan dan dipenuhi.

Sumber data : LKE Pemkot Binjai 2021

d. Capaian Komponen Hasil

Capaian komponen hasil merupakan salah satu komponen dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Binjai. Komponen hasil merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan akhir dari upaya peningkatan semua area perubahan yang didukung adanya capaian antara dan capaian reform serta dilaksanakan oleh institusi/lembaga penilai yang memiliki kewenangan atas hal tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Komponen hasil menggambarkan parameter kinerja utama daerah yang berkaitan dengan capaian sasaran Reformasi Birokrasi yang meliputi terwujudnya Pemerintah Kota Binjai yang bersih dan akuntabel, kapabel dan memiliki pelayanan publik yang prima/berkualitas. Berikut disajikan capaian komponen hasil pada Pemerintah Kota Binjai Tahun 2021.

TABEL 2.12
CAPAIAN KOMPONEN HASIL TAHUN 2021

NO.	ASPEK HASIL	BOBOT	NILAI	SUMBER DATA
SASARAN RB 01 : TERWUJUDNYA PEMERINTAH KOTA BINJAI YANG AKUNTABEL				
	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN			
1.	Opini BPK	3.00	3.00	BPK RI
2.	Nilai SAKIP	7.00	3.65	KEMENPAN RB
SASARAN RB 03 : TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA/BERKUALITAS				
	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10.00	8.27	KEMENPAN RB

SASARAN.....

SASARAN RB 01 : TERWUJUDNYA PEMERINTAH KOTA BINJAI YANG BERSIH DAN BEBAS KKN				
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN				
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	10.00	Belum Diisi	KPK RI
SASARAN RB 02 : TERWUJUDNYA PEMERINTAH KOTA BINJAI YANG KAPABEL				
KINERJA ORGANISASI				
5	Capaian Kinerja	5.00	2.50	
6	Kinerja Lainnya	2.00	0.00	
7.	Survei Internal Organisasi	3.00	BELUM DIISI	SPI Internal oleh KPK RI

Sumber data : LKE Pemkot Binjai 2021, Nilai telah dikonversi.

2. Hasil Reviu APIP atas PMPRB 2021

a. Simpulan Hasil Penilaian Mandiri

Memenuhi amanat pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pasal 5 bahwa Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja sebelum di kompilasi dengan hasil Penilaian Mandiri oleh Pemerintah Kota Binjai (instansi koordinator) terlebih dahulu direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Binjai.

Berdasarkan hasil reviu tersebut, berikut poin-poin penting hasil reviu sebagai berikut :

KOMPONEN PENGUNGKIT	
ASPEK PEMENUHAN	
1	Manajemen Perubahan
	Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai belum menindaklanjuti serta melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas seluruh rencana kerja serta rencana aksi pelaksanaan Refromasi Birokrasi ;
	Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi belum melibatkan seluruh unit organisasi;
	Anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi/internalisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi;
	Tim Assessor Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai belum mendapatkan pemahaman dan pelatihan yang cukup terkait pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
	Belum ada upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>

KOMPONEN.....

KOMPONEN PENGUNGKIT	
ASPEK PEMENUHAN	
2	Deregulasi Kebijakan
	Pemerintah Kota Binjai belum melaksanakan Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala.

KOMPONEN PENGUNGKIT	
ASPEK PEMENUHAN	
3	Penataan dan Penguatan Organisasi
	Pemerintah Kota Binjai belum melaksanakan Evaluasi untuk menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis belum dilaksanakan secara tertib dan ditindaklanjuti

KOMPONEN PENGUNGKIT	
ASPEK PEMENUHAN	
4	Penataan Tata Laksana
	Belum dilakukan penilaian mandiri terhadap Peta proses bisnis dan Prosedur operasional, namun belum disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas Birokrasi;
	Pemerintah Kota Binjai belum melaksanakan pengawasan terhadap kearsipan sesuai dengan Perka ANRI Nomor 38/2015

KOMPONEN PENGUNGKIT	
ASPEK PEMENUHAN	
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
	Pemerintah Kota Binjai belum menetapkan Standar Kompetensi Jabatan secara formal;
	Pemerintah Kota Binjai belum mendokumentasi Rencana redistribusi pegawai secara tertib;
	Pemerintah Kota Binjai belum melaksanakan <i>Monitoring</i> dan penilaian mandiri pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala dengan tertib.

KOMPONEN PENGUNGKIT	
ASPEK PEMENUHAN	
6	Penguatan Akuntabilitas
	Pemerintah Kota Binjai melalui seluruh pimpinan organisasi belum melakukan pemantauan dan pencapaian kinerja secara berkala;
	Kualitas SDM yang menangani akuntabilitas masih perlu ditingkatkan.

KOMPONEN.....

KOMPONEN PENGUNGKIT	
ASPEK PEMENUHAN	
7	Penguatan Pengawasan
	Pemerintah Kota Binjai belum menetapkan regulasi Kepala Daerah terkait <i>Whistle Blowing System</i> dan benturan kepentingan;
	APIP Pemerintah Kota Binjai belum didukung dengan anggaran dan SDM yang memadai

KOMPONEN PENGUNGKIT	
ASPEK PEMENUHAN	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	Pemerintah Kota Binjai belum menetapkan sistem <i>punishment</i> (sanksi) / <i>reward</i> (penghargaan) bagi unit kerja pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak dilakukan sesuai standar

KOMPONEN HASIL	
Akuntabilitas Kinerja Keuangan	
	Pemerintah Kota Binjai harus terus meningkatkan nilai SAKIP
Kualitas dan Pelayanan Publik	
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan pada Pemerintah Kota Binjai perlu ditingkatkan
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	
	Pemerintah Kota Binjai belum melaksanakan Survei Eksternal untuk menilai indeks persepsi korupsi
Kinerja Organisasi	
	Pemerintah Kota Binjai belum melaksanakan Survei Internal untuk menilai Kapasitas Organisasi disamping itu capaian kinerja dan kinerja lainnya harus ditingkatkan

b. Rekomendasi

Adapun dari berbagai kesimpulan diatas dapat ditarik beberapa rekomendasi guna menjadi perbaikan kedepannya diantaranya:

- 1) Pemerintah Kota Binjai melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kedepannya dalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi agar melibatkan seluruh unit Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Binjai sehingga seluruh unit mendapatkan pemahaman dan sosialisasi terkait hal tersebut;

2) Pemerintah.....

- 2) Pemerintah Kota Binjai melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah agar dapat bekerjasama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menelaah dan melakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron. Sehingga dapat diketahui apakah peraturan tersebut perlu atau tidak untuk dilakukan evaluasi;
- 3) Pemerintah Kota Binjai melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai agar dalam melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan prosedur operasional dapat menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektifitas Birokrasi;
- 4) Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika agar segera melakukan pengembangan *e-government* di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses Birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem *data base* SDM, dll);
- 5) Pemerintah Kota Binjai melalui Badan Kepegawaian Daerah agar menyusun standar kompetensi pegawai, kode etik pegawai, rencana redistribusi pegawai, serta melakukan *monitoring* dan penilaian mandiri atas pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta pencapaian kinerja individu secara berkala;
- 6) Pemerintah Kota Binjai melalui Inspektorat Daerah bekerjasama dengan Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah agar segera menyusun Peraturan Walikota beserta Standar Operasional Prosedur terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, *Whistle Blowing System*, serta Penanganan Benturan Kepentingan;
- 7) Pemerintah Kota Binjai melalui Inspektorat Daerah bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang menangani kanal LAPOR! dapat mendistribusikan pengaduan tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait, sehingga dapat ditangani dan ditindaklanjuti;
- 8) Pemerintah Kota Binjai agar dapat mengalokasikan anggaran yang memadai kepada Inspektorat Daerah agar dapat menjalankan peran sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan maksimal;
- 9) Pemerintah Kota Binjai agar dapat mengalokasikan anggaran yang memadai kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai agar dapat menjalankan perannya sebagai koordinator Reformasi Birokrasi dengan maksimal;
- 10) Pemerintah.....

- 10) Pemerintah Kota Binjai agar melaksanakan Survei Internal untuk menilai Kapasitas Organisasi serta survei eksternal untuk menilai indeks persepsi korupsi masyarakat;
- 11) Pemerintah Kota Binjai melalui Bagian Organisasi dan Tim Reformasi Birokrasi serta Kelompok Kerja yang telah dibentuk wajib melakukan pembinaan dan pendampingan secara periodik agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah melalui inspektorat.

3. Hasil Evaluasi Kemenpan RB atas LKE 2021

Pencapaian dan evaluasi atas pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi pada tahap akhir adalah proses evaluasi eksternal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana amanat Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 pasal 5 dan 6.

Evaluasi eksternal atas pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Binjai tahun 2021 dituangkan dalam Surat Nomor B/161/RB.06/2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 tertanggal 7 Maret 2022. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Binjai tahun 2021 adalah 42,94 dengan kategori "C". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 2.13
INDEKS REFORMASI BIROKRASI

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
			2021
A. Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	7,49
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	3,52
	III. Reform	30,00	4,92
	Total Komponen Pengungkit	60,00	15,93
B. Komponen Hasil			
	I. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,61
	II. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,85
	III. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,43
	IV. Kinerja Organisasi	10,00	5,12
	Total Komponen Hasil	40,00	27,01
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (PENGUNGKIT + HASIL)	100,0	42,94

2. Hasil.....

2. Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kota Binjai, telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2.14
PARAMETER HASIL ANTARA

NO.	PARAMETER HASIL ANTARA/SKOR	SKALA	NILAI	SUMBER DATA (INSTITUSI DISINGKAT)
1.	Indeks Sistem Merit	0-400	87,5	KASN
2.	Indeks Profesional ASN	0-100	32,71	BKN
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	1,67	Kementerian PANRB
4.	Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	5,51	LKPP RI
5.	Indeks Pelayanan Publik	0-5	2,40	Kemenpan RB
6.	Indeks Internal Audit <i>Capability Model</i> (Kapabilitas APIP)	0-5	3	BPKP
7.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0-5	2	BPKP
8.	Indeks Pengelolaan Kearsipan	0-100	22,82	ANRI
9.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	62,12	Ombudsman Republik Indonesia

3. Pemerintah Kota Binjai belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil rekomendasi dari tahun sebelumnya, sehingga belum terdapat perbaikan yang signifikan dalam penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
4. Selain terkait tindak lanjut, Pemerintah Kota Binjai juga perlu memperhatikan beberapa hal untuk mengoptimalkan program Reformasi Birokrasi diantaranya sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih bersifat administratif, yang fokus terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum memberikan dampak perubahan yang signifikan. Selain itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih di tingkat Pemerintah Daerah, penerapan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya merata dan belum berjalan secara optimal;

b. Penentuan.....

- b. Penentuan agen perubahan belum didasarkan pada kebutuhan organisasi, sehingga kehadiran agen perubahan belum memberikan perubahan budaya kinerja kearah yang lebih baik;
- c. Pemerintah Kota Binjai belum menyusun rencana aksi pembangunan Reformasi Birokrasi, dimana rencana aksi tersebut dijadikan acuan dalam membangun Reformasi Birokrasi, sehingga pembangunan Reformasi Birokrasi lebih terarah dan terukur;
- d. Peta keterkaitan antara kebijakan Pemerintah pusat Pemerintah daerah dan OPD belum disusun, sehingga belum dapat mengidentifikasi kebijakan yang tidak harmonis, dan kebijakan yang tumpang tindih;
- e. Peta proses bisnis yang ada sekarang ini belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi, dan rencana strategis Pemerintah Daerah. Selain itu penerapan *e-government* masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga belum mengungkit kinerja dan layanan;
- f. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai tindak lanjut asesmen sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum menyeluruh, dan tidak ada pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi;
- g. Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masih terbatas pada peran untuk mengevaluasi program dan kegiatan serta memberikan usulan penyempurnaannya (*insight*), dan belum menyentuh peran untuk mengevaluasi kinerja organisasi (*oversight*) maupun peran untuk memprediksi resiko dan peluang yang akan terjadi serta memberikan usulan kebijakan kepada unit kerja (*foresight*);
- h. Pelaksanaan kebijakan pengawasan internal dan integritas, seperti penanganan gratifikasi, *Whistle Blowing System*, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan masih bersifat formalitas dalam pelaksanaannya. Sehingga belum sepenuhnya efektif dalam mengawal organisasi untuk mewujudkan kinerja organisasi; dan

i. Upaya.....

- i. Upaya pelayanan publik yang diberikan masih berada pada tahap pemenuhan standar minimal dan belum diarahkan pada pelayanan prima.
5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Kota Binjai memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2.15
KOMPONEN HASIL

NO.	ASPEK HASIL	OPINI	NILAI	SUMBER DATA
1.	Opini BPK	Opini	WTP	BPK RI
2.	Nilai SAKIP	0-100	51,53	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	78,50	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	74,27	KPK
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	74,03	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

- a. Melakukan penguatan dan penajaman program Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah hingga ke level OPD. Program-program yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi serta rencana kerja pada level OPD diharapkan dapat fokus pada upaya-upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, serta pelayanan publik yang berkualitas;
- b. Menetapkan agen perubahan secara baik sehingga agen perubahan terpilih, dapat menciptakan budaya kinerja yang lebih baik pada masing-masing unit kerja sesuai dengan target-target yang diharapkan;

c. Menyusun.....

- c. Menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi berikut dengan ukuran keberhasilannya, untuk dijadikan acuan oleh pusat dan OPD dalam membangun Reformasi Birokrasi;
- d. Memetakan kebijakan yang ada agar dapat mendeteksi kebijakan yang tidak harmonis, dan kebijakan yang tumpang tindih antara kebijakan Pusat Pemda dan OPD, untuk selanjutnya disinkronkan atau dicabut;
- e. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi penerapan *e-government* yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan dan evaluasi secara berkala;
- f. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia, antara lain dengan menyusun standar kompetensi jabatan, melakukan asesmen pegawai secara menyeluruh, menyusun HCOP dan pemetaan talenta pegawai sebagai dasar penempatan jabatan yang bersifat kritikal/suksesi;
- g. Meningkatkan kapabilitas APIP untuk menjadi *Trusted Advisor and Quality Assurance* melalui peningkatan kuantitas dan kapasitas auditor, serta secara bertahap merubah budaya dan cara kerja APIP untuk lebih mengawal pencapaian kinerja dan identifikasi risikonya dibandingkan sebatas melakukan reuiu, audit dan evaluasi rutin;
- h. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, *Whistleblowing System*, pengelolaan pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, serta penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah baik di tingkat Pemerintah daerah maupun di tingkat OPD; dan
- i. Meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan menindaklanjuti hasil penilaian survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi dalam hal pelayanan agar mampu memberikan kepuasan secara maksimal kepada masyarakat.

4. Capaian Umum Sasaran Reformasi Birokrasi

Dalam upaya untuk memudahkan Pemerintah Kota Binjai dalam mengukur keberhasilan atas capaian pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi tahun 2021 sebagai *base line* penyusunan *Road Map* periode

2022-2024.....

2022-2024, berikut ini disajikan kompilasi capaian aspek hasil antara dan capaian komponen hasil yang telah dikelompokkan kedalam 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini :

TABEL 2.16
CAPAIAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

NO.	PARAMETER HASIL ANTARA/SKOR	SKALA	NILAI	SUMBER DATA (INSTITUSI DISINGKAT)
CAPAIAN PENGUNGKIT/ ASPEK HASIL ANTARA				
1	Indeks Internal Audit <i>Capability Model</i> (Kapabilitas APIP)	0-5	3	BPKP
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0-5	2	BPKP
CAPAIAN KOMPONEN HASIL				
1	Opini BPK	Opini	WTP	BPK RI
2	Nilai SAKIP	0-100	51,53	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	74,27	KPK
<p>Analisa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi pada aspek hasil antara belum optimal dan masih perlu dilakukan upaya peningkatan semua aspek yang ada dalam penetapan indeks kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP 2. Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi pada komponen hasil menunjukkan perlunya upaya penguatan SAKIP melalui upaya upaya sistematis pada koordinator dan perangkat daerah. 3. Bahwa dari seluruh capaian parameter akuntabilitas dan bersih dari korupsi dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Binjai dalam aspek pelaporan keuangan memiliki hasil sangat baik namun dalam penggunaan efektivitas dan efisiensi belanja dan sistem pengawasan keuangan daerah masi perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Kota Binjai 				

TABEL 2.17
CAPAIAN BIROKRASI YANG KAPABEL

NO.	PARAMETER HASIL ANTARA/SKOR	SKALA	NILAI	SUMBER DATA (INSTITUSI DISINGKAT)
CAPAIAN PENGUNGKIT/ ASPEK HASIL ANTARA				
1.	Indeks Sistem Merit	0-400	87,5	KASN
2.	Indeks Profesional ASN	0-100	32,71	BKN
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	1,67	Kementerian PANRB
4.	Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	5,51	LKPP RI
5	Indeks Pengawasan Kearsipan	0-100	22,82	ANRI

CAPAIAN.....

CAPAIAN KOMPONEN HASIL				
1	Survei Internal Organisasi	0-100	74,03	SPI Internal oleh KPK
<p>Analisa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa seluruh parameter capaian hasil antara menunjukkan tingkat capaian kurang dari 50% dari skala yang ditetapkan dan hal tersebut menunjukkan adanya keadaan/kondisi yang sangat perlu mendapat perhatian agar kinerja organisasi menjadi lebih baik. 2. Bahwa capaian pada komponen hasil menunjukkan hasil yang cukup baik dan masih perlu ditingkatkan secara bertahap dengan memetakan dan mengevaluasi semua komponen pembentuk survei yang masih perlu diperbaiki. 3. Bahwa dari semua hasil parameter yang ditetapkan, dapat disimpulkan atas kondisi kapabilitas atau kemampuan sistem kerja organisasi masih sangat jauh dari target yang diinginkan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah yang kapabel. 				

TABEL 2.18
CAPAIAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

NO.	PARAMETER HASIL ANTARA/SKOR	SKALA	NILAI	SUMBER DATA (INSTITUSI DISINGKAT)
CAPAIAN PENGUNGKIT/ ASPEK HASIL ANTARA				
1	Indeks Pelayanan Publik	0-5	2,40	Kemenpan RB
2	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	62,12	Ombudsman Republik Indonesia
CAPAIAN KOMPONEN HASIL				
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	78,50	Kementerian PANRB
<p>Analisa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian aspek hasil antara untuk parameter Indeks Pelayanan Publik dan kepatuhan Standar pelayanan publik masih perlu ditingkatkan dalam rangka menunjang indeks Reformasi Birokrasi 2. Pada capaian komponen hasil dipandang perlu melakukan upaya upaya peningkatan indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik. 3. Bahwa dari seluruh capaian parameter pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik dengan konsep smart city belum mampu diwujudkan secara optimal. 				

C. DAMPAK/HASIL KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI 2016 - 2021

Dampak merupakan pengaruh atau determinan yang menyebabkan atau mendatangkan akibat. Dalam Reformasi Birokrasi, dampak merupakan semua faktor yang memicu dan mendorong munculnya akibat yang negatif maupun positif. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai periode kedua (2016-2021), berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang ada dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Fluktuasi.....

a. Fluktuasi komitmen para pimpinan daerah dan organisasi. Selama 2016-2021, komitmen yang diberikan oleh Tim Reformasi Birokrasi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Daerah berbeda-beda hasilnya meskipun sudah mengalami peningkatan. Konsistensi peran dan komitmen mutlak diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Memiliki peta dan sistem *monitoring* pemenuhan komitmen dianggap sebagai sesuatu yang harus ada. Menjadikan Lembar Kerja Evaluasi menjadi bagian dari modul dalam konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi menjadi alternatif untuk mengetahui pertumbuhan komitmen dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas suksesnya Reformasi Birokrasi.

Komitmen Kepala OPD selaku pimpinan instansi telah memberi pengaruh besar dalam perjalanan Reformasi Birokrasi di Kota Binjai. Meski demikian, masih perlu adanya peningkatan komitmen agar capaian 8 (delapan) area perubahan sebagai komponen pengungkit dapat lebih baik di masa mendatang.

b. Kualifikasi Sumber daya manusia penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif serta mampu memberikan layanan berkualitas ditentukan dari kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur. Memahami bidang tugas, menguasai metode kerja, menguasai teknologi informasi, dan memiliki komitmen kinerja yang tinggi sangat perlu untuk dibenahi. Indeks SPBE, kualitas pelayanan publik, efektivitas kinerja, dan memiliki integritas tinggi menjadi gambaran indikator yang ada untuk kebutuhan mendukung peningkatan hasil Reformasi Birokrasi dan pencapaian sasaran dimasa mendatang.

c. Adaptasi transformasi digital dalam pemerintahan. Perkembangan jenis pelayanan, teknik pelayanan, kompetisi, kebutuhan kualitas informasi manajemen, akuntabilitas, dan pemenuhan standar global mengharuskan dilakukannya transformasi digital melalui penyegeraan penerapan sistem Pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah Kota Binjai selama periode kedua Reformasi Birokrasi belum menjadikan transformasi digital sebagai tulang punggung sistem penyelenggaraan pemerintahan. Indeks capaian diatas menjadi bukti bahwa transformasi digital menjadi suatu pilihan wajib dalam periode ketiga Reformasi Birokrasi.

d. Pencapaian.....

- d. Pencapaian *Key performance indicator* tanpa umpan balik. Dalam periode kedua, Pemerintah Kota Binjai telah banyak melakukan terobosan dan upaya memperbaiki iklim Reformasi Birokrasi. Beberapa capaian indeks Reformasi Birokrasi telah membuktikan bahwa Pemerintah Kota Binjai telah bekerja bersungguh-sungguh. Namun, dari semua keberhasilan yang ada, masih sangat diperlukan perbaikan dan pembenahan. Apabila pemenuhan *Key Performance Indicators* hanya ditujukan dalam rangka pelaporan dan pemenuhan kepatuhan pada perundangan, tidak akan mampu mendorong terwujudnya cita-cita dan sasaran Reformasi Birokrasi. Penyediaan informasi *real time* semua indikator kinerja, menganalisis penyebabnya secara *real time* dan merekomendasikan upaya penyelesaian dan perbaikan sebagai umpan balik atas capaian yang tidak maksimal, merupakan keharusan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahap ketiga (2022-2026). SPBE tidak hanya menjadi sarana pemenuhan informasi manajemen bidang perencanaan, dan pertanggungjawaban, namun Pemerintah Daerah wajib memperluas area cakupan SPBE menjadi Sistem Informasi Manajemen berbasis elektronik yang mampu memberi informasi selengkapnyanya tentang indikator kinerja semua OPD secara *real time* kepada pengguna informasi sebagai dasar penilaian dan pengambilan keputusan.
- e. *Smart City* yang diharapkan akan memberi dampak kinerja sistem pelayanan publik ternyata belum mampu memberikan indeks atau tingkat kepuasan yang memadai dan belum mendorong adanya tingkat kepatuhan terhadap standar layanan yang optimal.

D. TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya *Grand Design* Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah.

a. Intervensi.....

a. Intervensi Politik

Persoalan politisasi dalam sistem Birokrasi terbukti menjadi penghambat kualitas manajemen pemerintahan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan politik. Hal yang menjadi tantangan terbesar dari lingkungan politik adalah intervensi politik dari para pejabat *political appointee* ke dalam Birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pemimpin dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi. Agenda-agenda Reformasi Birokrasi terhambat karena pemimpin instansi tidak memiliki komitmen untuk mendukung Reformasi Birokrasi karena Birokrasi diposisikan untuk mengamankan kepentingan politik sehingga Birokrasi menjadi tidak netral. Dampak negatif intervensi politik ke dalam Birokrasi dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan negara dapat meningkat dalam hal korupsi kebijakan, misalokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukan awalnya, hingga pelayanan diskriminatif. Situasi ini dapat berkembang menjadi semakin negatif ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi dan etika publik yang terinternalisasi ke dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP yang masih rendah.

b. Inkapabilitas Dan Mentalitas Silo

Rendahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) mempersulit pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahkan sebagian bersikap resisten dan tidak memahami esensi Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diperburuk dengan mentalitas silo yang menjadi penghadang upaya sinergitas agenda-agenda Reformasi Birokrasi dan membentuk persepsi bahwa Reformasi Birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari instansi atau sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat administratif

c. Birokrasi Yang Tertutup

Birokrasi yang tertutup menyebabkan lemahnya kontrol dan partisipasi masyarakat terhadap Birokrasi. Hal ini dikarenakan tidak ada interaksi antara Birokrasi dengan lingkungan eksternal, termasuk masyarakat sebagai penerima layanan publik. Akibatnya Birokrasi menjadi tidak responsif terhadap berbagai kebutuhan

Masyarakat.....

masyarakat. Untuk menjadi Birokrasi yang berkelas dunia, Birokrasi harus mampu berkolaborasi dengan berbagai aktor dan sektor dalam berbagai proses pengambilan kebijakan dan pelayanan publik

d. Peran Kepemimpinan

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah tidak terlepas dari komitmen pemangku kepentingan di Pemerintah Daerah. Beberapa instansi yang memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pimpinan daerah dan Kepala OPD tersebut memimpin langsung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menjamin netralitas Birokrasi.

e. Program yang Fokus dan Terarah

Beberapa Pemerintah daerah telah berhasil memaksimalkan kinerja organisasi melalui penyusunan program yang fokus dan terarah. Beberapa program-program rutin dan berskala kecil disusun ulang dan dikembangkan menjadi sebuah program baru yang lebih besar. Kompleksitas program baru yang lebih besar tersebut menuntut kolaborasi, integrasi dan koordinasi yang lebih intens diantara unit kerja. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk merubah budaya dan *mindset* aparatur sipil negara agar lebih inovatif dan kolaboratif. Hasilnya, program yang dibuat lebih menysasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan *mindset* Aparatur Sipil Negara (ASN).

f. Memahami Kompleksitas dan Kesenjangan Kompetensi untuk Melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Sangat penting untuk memahami kompleksitas Reformasi Birokrasi dan kesenjangan kompetensi aparatur sipil negara untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Hal ini dibutuhkan agar kebijakan dan program Reformasi Birokrasi yang dibuat sesuai dengan konteks dan kondisi di tiap-tiap instansi.

Kegagalan memahami kompleksitas dan kesenjangan kompetensi untuk melaksanakan Reformasi akan menggiring upaya Reformasi Birokrasi pada kondisi yang frustrasi dan stagnan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan kemampuan organisasi dan

personil.....

personil merespon perubahan. Namun perlu diperhatikan bahwa target keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak juga boleh terlalu rendah agar perubahan yang diharapkan dapat dirasakan.

g. Sistem Tata Kelola Data Kinerja Elektronik Belum Diterapkan Secara Menyeluruh Dan Terintegrasi.

Kebutuhan informasi yang berkualitas dalam peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi sangat dibutuhkan. Mewujudkan organisasi yang kapabel, bekerja efektif dan efisien serta tetap fungsi sangat tergantung ketersediaan informasi berkualitas. Kualitas informasi pemerintahan yang riil, akurat dan lengkap memudahkan pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. Reformasi Birokrasi membutuhkan jaminan ketersediaan data kinerja secara lengkap dan mudah diakses setiap saat. Informasi kinerja menjadi pendukung pembuktian bekerjanya sistem kinerja secara menyeluruh dari setiap perangkat daerah.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. LINGKUNGAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Birokrasi merupakan mesin negara (*state machinery*), sebagai mesin negara Birokrasi sudah sewajarnya memiliki sifat pelayanan prima dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut selalu dibutuhkan perbaikan, kaji ulang dan proses lainnya dari yang bersifat *review* biasa sampai ke perubahan total pada pola tata kelola Birokrasi yang dikenal dengan Reformasi Birokrasi. Hal-hal yang bersifat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi harus dapat diidentifikasi dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. *Road Map* yang disusun ini telah mengidentifikasikan komponen apa saja dalam lingkungan Reformasi Birokrasi yang mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Binjai, diantaranya politisasi dan kooptasi Birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya Birokrasi; globalisasi dan tujuan Pembangunan berkualitas dan *smart government* di era revolusi industri 4.0. Hal tersebut juga dikemukakan sebagai lingkungan strategis yang berlaku secara umum di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana digambarkan dibawah ini :

GAMBAR 3.1
LINGKUNGAN STRATEGIS



1.Politisasi.....

1. Politisasi Dan Kooptasi Birokrasi

Sebagai suatu keputusan politik, Reformasi Birokrasi yang akan dijalankan oleh pemerintahan daerah dihadapkan dengan kemampuan kepemimpinan dan juga adanya *public distrust* terhadap layanan yang diberikan. Praktik tata kelola dalam Birokrasi yang diharapkan merupakan layanan prima, dalam realita Aparatur Sipil Negara (ASN) berubah menjadi pelayanan bagi sekelompok kepentingan dan menjadi tidak netral disebabkan adanya politisasi dan kooptasi Birokrasi. Pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan merupakan tantangan yang sulit dihadapi. Birokrasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari campur tangan kepentingan partai politik dan pemegang kekuasaan.

Pemerintah Kota Binjai memandang perlu adanya upaya-upaya yang dapat meminimalisir dampak politisasi dan kooptasi Birokrasi sesuai semangat dan cita-cita pembangunan Kota Binjai, yang tertuang dalam misi Walikota Binjai. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi hanya akan memperlambat dan menjadi penghalang terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif. Politisasi Birokrasi akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Birokrasi itu sendiri. Politisasi Birokrasi akan menghambat pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya manusia (aparatur sipil negara) menjadi pemberi layanan yang kapabel dan profesional.

2. Penegakan dan Kepastian Hukum

Salah satu misi Kota Binjai adalah mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan, termasuk dalam lingkungan Birokrasi. Dukungan terhadap pencapaian misi pemerintahan Kota Binjai ini harus bisa diwujudkan melalui Reformasi Birokrasi pada bidang hukum di lingkungan Birokrasi pemerintahan. Dari sisi proses Reformasi Birokrasi sendiri diperlukan pendekatan koersif. Perwujudan kepastian hukum sebagai bentuk pendekatan koersif adalah tindakan nyata dari negara atau Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan hukum dalam sistem Birokrasi berupa perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan.....

Perlindungan hukum preventif penting dan wajib diberikan Pemerintah Daerah kepada Birokrasi dan Aparatur Sipil Negara dengan tujuan untuk salah satu misi Kota Binjai adalah mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan, termasuk dalam lingkungan Birokrasi. Dukungan terhadap pencapaian misi pemerintahan Kota Binjai ini harus bisa diwujudkan melalui Reformasi Birokrasi pada bidang hukum di lingkungan Birokrasi pemerintahan. Dari sisi proses Reformasi Birokrasi sendiri diperlukan pendekatan koersif. Perwujudan kepastian hukum sebagai bentuk pendekatan koersif adalah tindakan nyata dari negara atau Pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum dalam sistem Birokrasi berupa perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif penting dan wajib diberikan Pemerintah daerah kepada Birokrasi dan Aparatur Sipil Negara dengan tujuan untuk

3. Administrasi dan Kelembagaan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dimanapun, administrasi publik akan memainkan sejumlah peran penting, diantaranya dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya negara yakni kemudahan layanan bagi masyarakat.

Dimensi sistem administrasi pemerintahan diarahkan memenuhi kriteria efisien dan memiliki landasan hukum dan arah tujuan yang jelas. Hal ini mengandung arti bahwa sistem administrasi yang baik mengharuskan terpenuhi efisiensi pelayanan dalam sistem Birokrasi dan memiliki landasan hukum serta tujuan dilaksanakan proses administrasi tersebut. Kualitas sistem administrasi ditentukan dari terpenuhinya standar mutu administrasi yaitu cepat, tepat dan akurat.

Kelembagaan dalam pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan roda pemerintahan karena merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam agenda Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Binjai memandang perlu melakukan penataan kelembagaan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien yang digambarkan sebagai lembaga yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Kelembagaan dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan.

Sedangkan.....

Sedangkan efisiensi digambarkan dalam bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government*. Kelembagaan harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Selain itu, proses dalam organisasi juga merupakan aspek yang sangat penting guna berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis. Selain dari pada itu, penataan kelembagaan menjadi kebutuhan dalam organisasi pemerintahan daerah yang modern dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan. Pemenuhan prinsip dasar penataan perangkat daerah menjadi keharusan. Prinsip kemandirian, pro aktif dan proses belajar menjadi arah baru penataan lembaga yang bermuara pada peningkatan kapabilitas, kompetensi dan kemampuan perangkat daerah dalam melayani. Prinsip kemandirian diperlukan dalam rangka mengoptimalkan luas lingkup organisasi dalam menjalankan fungsi layanan. Penataan kelembagaan juga mengharuskan Pemerintah daerah menanggapi tuntutan perkembangan dinamika masyarakat yang dilayani. Dan penataan lembaga juga wajib dilakukan secara bertahap dan diarahkan pada perbaikan sub sistem yang menjadi pusat permasalahan.

4. Budaya Birokrasi

Budaya Birokrasi yang selama ini terbentuk tak terlepas dari sikap mental para pemimpin atau pemegang jabatan dalam mengelola jalannya roda pemerintahan. Sering dijumpai justru contoh yang tidak baik berasal dari para atasan langsung berupa sikap minta dilayani, berorientasi membelanjakan dari pada menghasilkan dan orientasi kerja yang menyimpang dengan fokus pada jabatan atau target penghasilan yang besar. Reformasi Birokrasi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Binjai melihat bahwa lingkungan budaya Birokrasi yang ada harus dilakukan perubahan yang signifikan dan terarah dengan mengacu pada visi dan misi Kota Binjai. Perubahan budaya Birokrasi yang mendukung Reformasi Birokrasi setidaknya mengedepankan 5 hal dan semestinya

dilakukan.....

dilakukan yaitu Birokrasi harus mengutamakan pendekatan tugas dari pada pendekatan kekuasaan dan wewenang, Birokrasi harus melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani, Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerja dengan orientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni efisiensi, efektif, bersih, transparan dan akuntabel, Birokrasi harus tetap memosisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik, dan terakhir Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari Birokrasi berkinerja kaku (*rigid*) menjadi organisasi Birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel dan responsif.

Budaya Birokrasi yang menjadi penghambat kinerja pelayanan dan kinerja Birokrasi pada Pemerintah Kota Binjai antara lain tanggung jawab yang terkonsentrasi dan tidak terdistribusi secara merata sesuai beban kerja, kepatuhan terhadap target kinerja yang belum optimal.

5. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkualitas

Isu menarik saat ini yang secara global menjadi tanggungjawab bersama warga dunia dan telah ditetapkan oleh PBB adalah *The Sustainable Development Goals* (SDG). PBB meletakkan SDG yang terdiri dari penurunan kualitas lingkungan, *sustainability*, perubahan iklim dan keamanan tersedianya air bersih sebagai tanggungjawab bersama dan tujuan bersama yang berkelanjutan dalam rangka menciptakan dunia yang lebih baik. Pemerintah Indonesia yang menjadi bagian dari pemerintahan di dunia turut memikul tanggungjawab ini dan menjadikannya sebagai bagian program Pemerintah dan *concern* terhadap isu-isu global ini. Sebagai bagian dari Birokrasi, Pemerintah Kota Binjai memiliki fungsi dan peran yang sama dan menerima bagian tanggungjawab untuk mengelola isu ini. Keberhasilan negara Indonesia di mata dunia tergantung dari kepiawaian sub sistem Birokrasi pemerintahannya mendukung seluruh program dan tujuan yang telah ditetapkan.

Perkembangan global lainnya yang perlu menjadi perhatian dan Birokrasi harus mampu menyikapinya dengan bijak adalah isu “*Big Data*”, pelayanan terintegrasi (*integrated service*), pelayanan yang lebih

mengakomodir.....

mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial intelligence* di ranah publik. Sikap dan tindakan yang dibutuhkan adalah kemampuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari aparatur Pemerintah untuk mengelola dan melibatkan diri dalam isu dan perkembangan global ini. Jangan sampai hanya sebagai *follower* sebaiknya juga menjadi *founder* ataupun *owner* pada setiap perubahan yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan global.

6. **Smart Government dan Revolusi Industri**

Persoalan penerapan teknologi informasi dalam menunjang tugas tugas pemerintahan harus diakui belum pada level yang memuaskan atau tinggi. Teknologi informasi yang hadir meskipun sudah sampai pada level penyediaan, pengolahan dan pendistribusian data dan informasi, namun belum terintegrasi, tidak memiliki konsep *big data*, belum menyentuh pada segmen kewenangan teknis perangkat daerah melainkan urusan perencanaan, anggaran, pelaporan keuangan, dan pengadaan barang jasa.

Kualitas informasi manajemen Pemerintah masih jauh dari makna memuaskan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan pemerintahan.

Smart City sebagaimana yang pernah ditetapkan dalam RPJMD periode 2016-2021 belum dapat mendongkrak kinerja pelayanan publik dan masih perlu disempurnakan. Teknologi informasi yang komprehensif dan kapabilitas aparatur penyelenggara layanan merupakan kendala yang selama ini terjadi. *Smart city* harus berjalan paralel dengan Kapabilitas Perangkat Daerah pemberi dan penyelenggara layanan. Kinerja sistem pelayanan publik tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sebagai pengguna tanpa didukung kualitas aparatur penyelenggara layanan dalam beradaptasi dengan teknologi informasi.

Pemenuhan data melalui transfer/pendistribusian dari pemilik informasi secara manual, pengumpulan laporan dari setiap OPD secara tradisional, sajian informasi yang tidak *real time*, kualitas informasi kinerja OPD yang tidak lengkap merupakan gambaran bahwa Pemerintah daerah harus menggeser paradigma *poor government* menjadi *smart government*. Percepatan pertumbuhan jenis dan kualitas teknologi informasi di dunia, menuntut Pemerintah Kota Binjai segera menyiapkan

diri.....

diri membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi, komprehensif dan *real time* dan mampu mengolahnya menjadi informasi yang berkualitas dengan mengembangkan analisis data.

Revolusi Industri 4.0 menjadi *trend* dalam dunia industri yang pada intinya merupakan penggabungan teknologi otomatisasi dengan teknologi *cyber*. Tentunya *trend* ini cepat atau lambat akan masuk dan memberikan dinamika baru dalam pengelolaan pemerintahan. Perkembangan teknologi dalam era industri 4.0 melibatkan beberapa teknologi pendukung dan berpengaruh besar dalam kehidupan dan tentu dalam tata kerja di pemerintahan termasuk didalamnya pola interaktif dengan masyarakat. Teknologi tersebut adalah teknologi *mobile internet*, *Internet of Things* (IoT), komputasi awan, kecerdasan buatan dan *big data*. Dampak yang jelas dari revolusi industri 4.0 ini adalah kesiapan tenaga kerja dan sistem pendidikan yang tentu akan berubah dengan hadirnya teknologi dan perangkat lainnya yang memudahkan kehidupan manusia. Sebagai regulator dan fungsi pelayanan maka Pemerintah memerlukan tata kerja Birokrasi yang fleksibel dan dinamis untuk bisa mengikuti dan mengadopsi *trend* ini dalam pengelolaan, pengaturan sistem dan tata kelola Birokrasi dengan tetap memegang asas efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel.

B. ISU – ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Pemerintah Kota Binjai memiliki peran strategis dalam pembangunan regional dan daerah. Untuk mewujudkan visi dan misi 2021-2026 secara maksimal, diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sistem Birokrasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan global namun tetap bercirikan budaya nasional dan etos kerja yang berakar pada kearifan lokal. Atas dasar tersebut, setiap kondisi yang diperkirakan akan dihadapi dalam menghadapi tantangan kedepan diperlukan pemetaan isu-isu strategis sebagai langkah persiapan dalam menjadi pemberi arah pemerintahan ke depan.

Isu strategis Reformasi Birokrasi yang perlu mendapatkan perhatian serius dan direspon dengan cepat oleh Pemerintah Kota Binjai dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya adalah tersedianya Profesionalisme menuju Smart Aparatur Sipil Negara (ASN), kesiapan menyongsong era e-akuntabilitas, penerapan secara penuh manajemen risiko pemerintahan Kota Binjai sebagai *benchmark* kinerja pelayanan publik.

1. Orientasi.....

1. Orientasi Layanan Publik Berkualitas

Menjawab komitmen Walikota Binjai dalam pembangunan jangka menengah daerah sejalan dengan cita cita Undang Undang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pelayanan berkualitas yang mampu mensejahterakan dan mengayomi masyarakat, maka Pemerintah Kota Binjai dalam RPJMD 2021-2026 menitikberatkan rencana pembangunan fasilitas publik berkualitas.

Penyediaan Mall Pelayanan Publik dan Penyediaan Taman Terbuka Hijau menjadi agenda utama pelayanan publik. Kehadiran Mall Pelayanan Publik yang mampu memudahkan dan mempercepat pelayanan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pengurusan Izin dan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan prioritas yang ingin diwujudkan Pemerintah Kota Binjai menjawab agenda Reformasi Birokrasi yang ketiga.

Penyediaan ruang terbuka hijau yang difasilitasi pusat olah raga, taman bermain, pusat perbelanjaan dan rumah sakit merupakan agenda lainnya dalam proses mewujudkan pelayanan publik. Kedua program tersebut sudah diagendakan dalam RPJMD Kota Binjai dan diharapkan dapat segera diwujudkan.

2. Unggul Sumber Daya Manusia dan Unggul Akuntabilitas

Aparatur Sipil Negara dalam konsep *smart* Aparatur Sipil Negara (ASN) mencakup terpenuhinya kriteria Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, berwawasan, menguasai teknologi informasi dan bahasa internasional, melayani secara prima, memiliki jejaring kerja yang luas, dan memiliki jiwa inovatif. Kebutuhan menghadapi Revolusi Industri 4.0 di lingkungan Pemerintah daerah hanya akan dapat dilakukan dengan tersedianya *Smart* Aparatur Sipil Negara (ASN). Menunjang kesiapan terwujudnya *Smart* Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi tuntutan global, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan melalui Peraturan Badan Kepegawaian RI Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjadi barometer ketersediaan Birokrasi yang andal, berdaya saing dan modern melalui pendekatan pembinaan dan pemberdayaan komprehensif dan berkesinambungan. Pemerintah Kota Binjai wajib mulai mengambil

langkah.....

langkah-langkah kebijakan pemberdayaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan paradigma baru yaitu *full skill* dan *future skill* Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi *Complex Problem Solving skill*, *Social Skill*, *Process Skill*, *Sistem Skill* dan *Cognitive Ability*.

Kebutuhan pembentukan *Corporate University* menjadi agenda isu strategis Kota Binjai dalam meningkatkan indeks profesionalisme. Penyediaan proses pembelajaran secara mandiri dan terintegrasi pada semua perangkat daerah dan menjadikan perangkat daerah sebagai rumah pertama peningkatan kompetensi pegawai diluar Badan Kepegawaian Daerah merupakan inti konsep *Corporate University*.

Kesetaraan adaptasi teknologi pada semua level manajemen merupakan kebutuhan khusus menghadapi era Birokrasi digital tahun 2024 sesuai *grand design* nasional. Kemampuan adaptasi teknologi informasi saat ini masih sangat jauh dari standar kebutuhan yang ada. Para Pejabat dan aparatur pada level pelaksana hingga pimpinan tinggi wajib memiliki kemampuan pemanfaatan teknologi yang hampir pasti akan menyentuh semua lapisan manajemen dengan diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan keinginan Walikota Binjai untuk memiliki sistem kendali kinerja terpadu satu data (*Command Centre*) yang mampu memberikan informasi *real time* terhadap capaian kinerja setiap perangkat daerah.

Selain isu SDM Unggul, Pemerintah Kota Binjai juga mengusung prioritas isu strategis akuntabilitas Unggul melalui penajakan penerapan sistem informasi manajemen data

kinerja yang diharapkan mampu mengelola semua informasi administrasi pemerintahan sesuai kebutuhan pada semua jenjang manajemen secara terpadu dan sistematis. Pertanggungjawaban kinerja kegiatan diharapkan dapat dikelola dalam satu sistem data kinerja terpadu dan dapat digunakan untuk setiap kebutuhan pelaporan dan evaluasi.

Dalam proses *remote* audit, kegiatan audit akan menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dengan analitik data untuk menilai keakuratan data keuangan dan kontrol internal, mengumpulkan bukti elektronik, dan berinteraksi dengan organisasi perangkat daerah, semua tanpa perlu hadir secara fisik atau membatasi kontak langsung. Dengan proses yang sedemikian rupa dipastikan bahwa era pertanggungjawaban tradisional melalui penerbitan laporan dan penyediaan dokumen akan bergeser menjadi pertanggungjawaban berbentuk data elektronik yang

dapat.....

dapat diakses oleh semua pemilik kewenangan pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya persiapan lain seperti komitmen dari pimpinan dan seluruh perangkat daerah harus jelas dan dipertegas dengan payung hukum yang kuat agar dari sisi objek dan subjek pengawasan terlindungi. Harus dilihat bahwa dalam remote audit akan melibatkan banyak pihak, keamanan data, transparansi dan sinergi dari semua yang terlibat dalam proses remote audit ini.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) maka salah satu isu terpenting dan sudah harus dijalankan adalah melaksanakan manajemen risiko yang menuntut seorang pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terhadap instansi yang dikelola. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Pandemi covid 19 telah menyadarkan Pemerintah pentingnya sebuah penerapan manajemen risiko. Kalkulasi tentang terganggunya target kinerja akibat pandemi, bergesernya sasaran pembangunan, kesulitan mendapatkan basis data dan informasi yang akurat terkait kelompok masyarakat penerima bantuan, dan *refocusing* APBD merupakan indikasi kebutuhan manajemen risiko perlu diterapkan.

Lebih lanjut, dalam aturan tersebut di atas disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang terdiri atas identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah.

Identifikasi yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis risiko untuk mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (*probability*) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi Pemerintah sudah efektif. Dalam pengelolaan risiko ini dibutuhkan juga pembangunan sistem manajemen risiko yang baik. Penggunaan teknologi dan pengembangan sistem yang

berkesinambungan.....

berkesinambungan harus terus dilakukan. Pola manajemen risiko terintegrasi menjadi pola terbaik yang dijalankan oleh pengelola dan pimpinan pemerintahan. Dengan menggunakan manajemen risiko terintegrasi dapat dilakukan penetapan batas toleransi atas risiko terhadap semua produk kebijakan yang diambil. Kerangka pengelolaan risiko yang ditetapkan harus adaptif, mudah dimengerti dan dapat dijalankan pada seluruh level jabatan di instansi. Manajemen risiko yang dijalankan harus didukung juga dengan efektifitas pelaksanaannya karena itu menumbuhkembangkan budaya risiko menjadi pilihan terbaik pada proses ini. Seluruh pengelola pemerintahan harus menyadari bahwa pengelolaan risiko pada hakekatnya adalah tanggung jawab seluruh jajaran, mengingat dampak kejadian risiko akan menimpa seluruh jajaran

3. Pusat Percontohan dan Inovasi

Budaya inovasi dalam menghasilkan prestasi dan kinerja yang baik merupakan kebutuhan. Sasaran Reformasi Birokrasi yang menuntut pelayan publik yang prima, yang dilakukan oleh Birokrasi yang efisien wajib menjadi hal yang harus dilakukan Pemerintah Kota Binjai. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka tuntutan terhadap peningkatan kinerja daerah semakin kuat dan menjadi sasaran yang harus dilakukan Pemerintah Kota Binjai agar tidak tertinggal dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Kegiatan pengelolaan pemerintahan yang dijadikan sasaran dalam pencapaian inovasi daerah ini meliputi bidang peningkatan pelayanan publik, bidang pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah Kota Binjai mulai melirik paradigma baru dalam konsep pelayanan publik. Menjadikan Organisasi Perangkat Daerah yang mampu minimal memberi satu konsep kinerja yang menjadi tolak ukur nasional (*benchmark*) melalui inovasi kinerja merupakan pilihan yang harus dilakukan. Setiap OPD memiliki Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) sebagai ukuran keberhasilan kinerja. Organisasi perangkat daerah di Kota Binjai harus didorong dan didukung untuk mampu mencapai minimal satu indikator kinerja tertinggi dibanding

OPD.....

OPD pada Pemerintah daerah lainnya untuk dapat dijadikan percontohan secara nasional. Menemukan inovasi yang sesuai dengan target kinerja OPD merupakan langkah rasional yang diperlukan.

Pencapaian keberhasilan inovasi daerah yang telah diperoleh dan dicapai selama ini harus diperluas lagi pada bidang lainnya yang menjadikan Pemerintah Kota Binjai sebagai *benchmarking*. Kemampuan inovasi yang dilakukan seluruh organisasi perangkat daerah dalam bidang-bidang capaian inovasi hanya dapat tercapai dengan melakukan *sustainable improvement* dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Inovasi ini sendiri akan berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang menuntut kemampuan dan kompetensi terbaik dari aparatur Pemerintah itu sendiri.

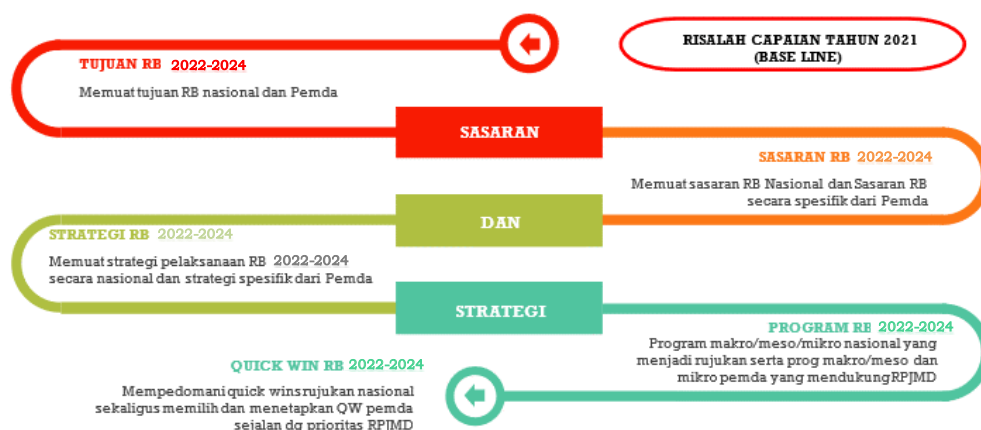
BAB IV.....

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022 - 2024

Pada BAB ini, *Road Map* Reformasi Pemerintah Kota Binjai 2022-2024 memberi pedoman tentang sasaran dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam gambar 4.1 dibawah ini :

GAMBAR 4.1
STRATEGI DAN PELAKSANAAN



A. RISALAH CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI 2017 - 2021

Langkah awal merumuskan strategi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode lima tahun kedepan (2021-2026) pada Pemerintah Kota Binjai dimulai dari proses penyajian risalah capaian reformasi Birokrasi periode sebelumnya (2017-2021) sebagai titik awal (*base line*). Penyajian risalah capaian periode sebelumnya dalam memformulasi strategi pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi lima tahun kedepan didasarkan pada diperolehnya informasi atas kelemahan dan keunggulan pada posisi *base line* (titik awal) tahun 2021 untuk setiap area perubahan dalam mendukung tercapainya hasil antara dan hasil reform serta hasil akhir periode mendatang.

Mempedomani semua capaian Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Binjai tahun 2021 sebagai titik dasar (*based line*) dengan menggunakan hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Tahun 2021 melalui Surat Nomor B/144/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 sebagai *based line* pengukuran pada *Road Map* ini, dapat dikemukakan dalam dimensi sesuai sasaran Reformasi Birokrasi yaitu capaian Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efisien-efektif serta pelayanan publik yang berkualitas.

Beberapa.....

Beberapa keberhasilan yang sudah diraih selama periode 5 Tahun
Kedua pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Binjai:

TABEL 4.1
CAPAIAN UMUM REFORMASI BIROKRASI 2021

No.	Parameter Hasil Antara/Skor	Skala	Nilai	Sumber Data	Jenis Sasaran RB
A.	CAPAIAN ANTARA				
1.	Indeks Sistem Merit	0-400	87,5	Komisi Aparatur Sipil Negara	Birokrasi yang Efisien dan Efektif
2.	Indeks Profesional ASN	0-100	32,71	Badan Kepegawaian Negara	Birokrasi yang Efisien dan Efektif
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	1,67	Kementerian PANRB	Birokrasi yang Efisien dan Efektif
4.	Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	5,51	LKPP Republik Indonesia	Birokrasi yang Efisien dan Efektif
5.	Indeks Pelayanan Publik	0-5	2,40	Kementerian PANRB	Pelayanan Publik Berkualitas
6.	Indeks Internal Audit <i>Capability Model</i> (Kapabilitas APIP)	0-5	3	BPKP	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
7.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0-5	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
8.	Indeks Pengawasan Kearsipan	0-100	22,82	Arsip Nasional Republik Indonesia	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
9.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	62,12	Ombudsman Republik Indonesia	Pelayanan Publik Berkualitas
B.	CAPAIAN HASIL				
10.	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
11.	Nilai SAKIP	0-100	51,53	Kementerian PANRB	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
12.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	78,50	Kementerian PANRB	Pelayanan Publik Berkualitas
13.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	74,27	KPK	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
14.	Survei Internal Organisasi	0-100	74,03	SPI Internal oleh KPK	Birokrasi yang Efisien dan Efektif

Sumber data : Hasil Evaluasi Kemenpan RI 2022 (Data Diolah).

Tabel 4.2.....

TABEL 4.2
CAPAIAN SASARAN 01 : BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

NO	JENIS INDEKS/INDIKATOR	BOBOT/ SKALA	NILAI	%
INDIKATOR SASARAN UTAMA				
1	Indeks Internal Audit <i>Capability Model</i> (Kapabilitas APIP)	0-5	3	60%
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0-5	2	40%
3	Indeks Pengawasan Kearsipan	0-100	22,82	22,82%
4	Opini BPK	Opini	WTP	100%
5	Nilai SAKIP	0-100	51,53	51,53%
6	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	74,27	74,27%

Sumber data : Hasil Evaluasi Kemenpan RI 2022 (Data Diolah).

TABEL 4.3
CAPAIAN SASARAN 02 : BIROKRASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

NO	JENIS INDEKS/INDIKATOR	BOBOT/ SKALA	NILAI	%
INDIKATOR SASARAN UTAMA				
1	Indeks Sistem Merit	0-400	87,5	21,87%
2	Indeks Profesional ASN	0-100	32,71	32,71%
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	1,67	33,4%
4	Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	5,51	5,51%
5	Survei Internal Organisasi	0-100	74,03	74,03%

Sumber data : Hasil Evaluasi Kemenpan RI 2022 (Data Diolah).

TABEL 4.4
CAPAIAN SASARAN 03 : PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

NO	JENIS INDEKS/INDIKATOR	BOBOT/ SKALA	NILAI	%
INDIKATOR SASARAN UTAMA				
1	Indeks Pelayanan Publik	0-5	2,40	48%
2	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	62,12	62,12%
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	78,50	78,50%

Sumber data : Hasil Evaluasi Kemenpan RI 2022 (Data Diolah).

B. TUJUAN PELAKSANAAN RB 2022 - 2024

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai Periode ketiga (Tahun 2022-2024) dititikberatkan pada upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini selaras dengan Misi ke-1 (satu) Walikota Kota

Binjai.....

Binjai dalam RPJMD 2021-2026 untuk *Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional*. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Binjai selaras dengan tujuan yang ditetapkan pada Misi Nomor 1 di atas yaitu **mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat**.

Berikut ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang terkait peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Binjai mempedomani RPJMD periode 2021-2026 sebagai berikut :

TABEL 4.5
PENJABARAN VISI, MISI, TUJUAN REFORMASI BIROKRASI DALAM KERANGKA RPJMD 2021-2026

VISI : MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS		
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional		
TUJUAN : Mewujudkan Pelayanan Birokrasi Khususnya Perizinan Yang Efektif dan Efisien Bagi Masyarakat		
SASARAN (UTAMA)	STRATEGI (UTAMA)	KEBIJAKAN (UTAMA)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan)	1. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional
	Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	1. Menyediakan layanan perizinan yang responsive, murah, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik 2. Membangun standarisasi kualitas pelayanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai
	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	1. Pemanfaatan <i>assessment center</i> sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur 2. Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja 3. Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan berintegritas
	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrase sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja 2. Memperkuat perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas 3. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien 4. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sumber : RPJMD Pemerintah Kota Binjai Periode 2021 – 2026

C. SASARAN.....

C. SASARAN PELAKSANAAN RB 2022 - 2024

Melanjutkan sasaran Reformasi Birokrasi pada periode lima tahun kedua (2017-2021), dalam periode ketiga (2022-2024) masih tetap pada tiga sasaran utama. Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Binjai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 03 Tahun 2021 serta berpedoman pada pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Fokus Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai adalah **memperbaiki aspek dan parameter yang belum maksimal pada periode sebelumnya serta mempertahankan dan mengembangkan capaian yang sudah memenuhi target dalam mendukung terwujudnya sasaran Reformasi Birokrasi.**

Sasaran Reformasi 2022-2024 masih mencakup tiga hal yaitu :

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Efisien dan Efektif;
3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, Pemerintah Kota Binjai menetapkan 13 (tiga belas) indikator sasaran yang merupakan prioritas yang masih harus diperbaiki dalam periode sebelumnya. Semua indikator dimaksud dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu :

1. Indikator sasaran terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Indikator sasaran terwujudnya Birokrasi yang Efisien dan Efektif
3. Indikator sasaran terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Di bawah ini adalah rincian dari indikator sasaran Reformasi Birokrasi 2022-2024 beserta *based line* tahun 2021 dan target pada tahun 2024.

Tabel 4.6.....

TABEL 4.6
SASARAN DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI 2022-2024

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	BOBOT / SKALA	NILAI BASELINE 2021	TARGET 2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Indeks Internal Audit <i>Capability Model</i> (Kapabilitas APIP)	0-5	3	3,3
	2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0-5	2	3
	3	Indeks Pengawasan Kearsipan	0-100	22,82	51
	4	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	5	Nilai SAKIP	0-100	51,53	65
	6	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	74,27	90
Birokrasi yang Kapabel	1	Indeks Sistem Merit	0-400	87,5	250
	2	Indeks Profesional ASN	0-100	32,71	60
	3	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	---	3
	4	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	---	80
	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	1,67	3,00
	6	Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	5,51	60
	7	Survei Internal Organisasi	0-100	74,03	88
Pelayanan Publik yg prima	1	Indeks Pelayanan Publik	0-5	2,40	4,3
	2	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	62,12	87
	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	78,50	91

Sumber : LHE 2022, Kemenpan RB dan sumber lainnya (data diolah)

D. STRATEGI PELAKSANAAN RB 2022 - 2024

Strategi adalah langkah berisikan program-program dan rencana kerja sebagai prioritas yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi. Strategi di dalam agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup proses penuangan secara sistematis rencana kerja terukur dari setiap sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan serta target yang ditentukan dalam kurun waktu lima tahu untuk melanjutkan dan memperbaiki capaian sebelumnya.

Strategi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai disusun untuk selaras dan sejalan dengan sasaran strategis, dan rencana kerja yang dituangkan oleh Pemerintah Kota Binjai dalam RPJMD periode 2021-2026 agar terwujud sinkronisasi agenda perencanaan penataan birokrasi dan agenda pembangunan Beberapa hal baru yang dituangkan dalam *Road Map* Pemerintah Kota Binjai 2022-2024, mencakup :

1. Strategi.....

1. Strategi yang ditetapkan harus lebih implementatif. Ditetapkannya sasaran dan indikator, rencana kerja yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil.
2. Strategi pelaksanaan harus melibatkan banyak pihak dalam lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan tidak menjadi tanggung jawab dari Tim Reformasi Birokrasi melainkan melibatkan semua unit kerja dalam menjabarkan dan melaksanakan program kegiatan. Unit kerja dalam setiap organisasi perangkat Daerah juga dilibatkan dalam pelaksanaan target dari sasaran Reformasi Birokrasi 2022-2024 yaitu 8 (delapan) area perubahan.
3. Strategi pembenahan dan penguatan kualitas pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi pada level unit terutama pada aspek pemenuhan dan aspek reform.
4. Menetapkan rencana kerja dan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang sesuai dalam mendukung dan menjembatani pemenuhan capaian-capaian target indikator program dan indikator sasaran.
5. Mewajibkan Perangkat Daerah menyusun, rencana kerja, rencana aksi, Peta Proses Bisnis dan Pohon Kinerja sebagai bagian dari rencana aksi peningkatan kualitas SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

GAMBAR 4.2
HUBUNGAN TUJUAN-SASARAN-STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BINJAI



Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Binjai mencakup dua tingkatan yaitu:

1. Meso.....

1. Meso (Pemerintah Kota Binjai / Koordinator *Leading Sector*).

Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah Kota Binjai melalui Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai *leading sector* / koordinator dalam hal ini adalah Bagian Organisasi Sekretariat Kota Binjai. Instansi tersebut bertanggungjawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan meso, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

2. Instansional.

Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah Pendukung.

E. RENCANA KERJA TAHUNAN

Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui rencana kerja tahunan prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia (*Grand Design Nasional RB 2025*). Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Binjai 2022-2024 dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup sasaran Reformasi Birokrasi yaitu bersih dan akuntabel, birokrasi kapabel serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Secara Umum *Cascading Road Map* Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Binjai 2022-2024 tersaji pada gambar dibawah ini :

GAMBAR 4.3
CASCADING ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BINJAI



Selain.....

Selain *cascading* Reformasi diatas yang bertujuan untuk menguraikan proses berjalannya Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Binjai dalam *Road Map* ini juga menetapkan kerangka waktu pencapaian 3 tahun dari sasaran Reformasi Birokrasi selama 2022-2024 seperti terlihat dalam gambar dibawah ini :

**GAMBAR 4.4
KERANGKA WAKTU SASARAN RB**



Pelaksanaan Level Meso dan rencana kerja/rencana aksi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso merupakan pelaksanaan sasaran Reformasi Birokrasi melalui pelaksanaan rencana aksi yang mempedomani rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pemerintah Kota Binjai. Penetapan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh dalam membantu pencapaian sasaran.

Dalam penetapan sasaran Reformasi Birokrasi, ditetapkan pula indikator, formula dan target selama tiga tahun (2022-2024). Selain itu juga ditetapkan Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* yang bertanggungjawab atas kebijakan dan strategi yang ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing. Dibawah ini disajikan *cascading* atau proses menurunkan penjabaran tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi kedalam strategi, kebijakan, rencana kerja dan rencana aksi yang disertai penetapan target dari indikator sasaran.

Tabel 4.7.....

TABEL 4.7

**CASCADING REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BINJAI LEVEL MESO 2022-2024
PADA SASARAN 01**

TUJUAN PELAKSANAAN SASARAN 01		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE) SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA (SEJALAN DENGAN MISI III RPJMD) TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH				
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA KERJA 8 AREA PERUBAHAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET		
				2022	2023	2024
1. Peningkatan capaian indikator kinerja akuntabilitas	1. Memperbaiki capaian nilai SAKIP 2. Mempertahankan Capaian Opini BPK atas LKPD	a. Meningkatkan nilai SAKIP	SETDAKO-INSPEKTORAT DAERAH	51,53	71	77
		b. Mempertahankan Opini WTP	BKAD	WTP	WTP	WTP
1. Penguatan Kapabilitas APIP dan Penguatan Maturity SPIP serta	1. Peningkatan secara bertahap kapabilitas APIP 2. Perbaikan level maturity SPIP	a. Penguatan kapabilitas APIP	INSPEKTORAT DAERAH	3	2.8	3.2
		b. Perbaikan Level Maturity SPIP	INSPEKTORAT DAERAH	2	3.0	3.0
1. Memperbaiki persepsi anti korupsi dan penguatan integritas	1. Penguatan pencegahan korupsi 2. Peningkatan integritas secara bertahap	a. Memperbaiki peringkat IPAK	INSPEKTORAT DAERAH	74,27	88	90

Rencana Aksi.....

RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Indeks-Indeks Akuntabilitas yang dikoordinir OPD yang melaksanakan kewenangan terkait. • Membentuk rencana Kerja Tim Gugus Tugas Akuntabilitas. • Melaksanakan rencana Kerja Tim Gugus Tugas secara terukur dan didukung kertas kerja. • Memonitor capaian Kerja Tim Gugus Tugas Akuntabilitas secara berkala. • Memperbaiki sistem kerja Kelompok Kerja Area Akuntabilitas. • Memperbaiki hasil penilaian setiap aspek dalam MCP KPK. • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran • Meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah • Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing • Menjaga Keberlanjutan peningkatan kualitas penyajian dan penyerahan LKPD/LKIP • Meningkatkan sistem integritas di perangkat daerah dalam upaya pencegahan KKN • Meningkatkan manajemen risiko dalam tata pemerintahan; • Meningkatkan Sistem Pengendalian intern berbasis risiko • Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan • Meningkatkan kinerja instansi pemerintah; • Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 4.8.....

TABEL 4.8
CASCADING REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BINJAI LEVEL MESO 2022-2024
PADA SASARAN 02

TUJUAN PELAKSANAAN SASARAN 02	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE) SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA (SEJALAN DENGAN MISI III RPJMD)					
SASARAN 02	MENINGKATNYA NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH					
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCAN KERJA 8 AREA PERUBAHAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET		
				2022	2023	2024
1. Optimalisasi peran serta pimpinan OPD dalam pelaksanaan Agenda RB	1. Intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan RB ditingkatkan 2. optimalisasi penyampaian informasi agenda reformasi pada pimpinan	a. Peningkatan Intensitas Keterlibatan Pimpinan dalam satu tahun	SETDAKO DAN OPD	>4	>6	>8
		b. Peningkatan Intensitas penyampaian informasi Reformasi Birokrasi kepada pimpinan	SETDAKO DAN OPD	>2	>4	>6
1. Penguatan dukungan pimpinan dalam mewujudkan perubahan 2. Optimalisasi kepatuhan dalam pelaksanaan budaya kerja	1. Meningkatkan keterlibatan dalam penetapan dan pengusulan Agen Perubahan secara objektif 2. Menurunkan angka pelanggaran disiplin 3. Meningkatkan produktivitas kinerja pegawai	PENATAAN MANAJEMEN PERUBAHAN melalui : a. Mendukung terwujudnya perubahan melalui inovasi b. Penurunan angka pelanggaran disiplin per tahun c. Perbaiki capaian output SKP ASN	BAPPEDA BKD(2022), BKPSDM (2023-2026) BKD (2022), BPKSDM (2023-2026)	1 <0.05 >90%	>1 per OPD <0.04 per thn >92% per ASN	>2 per OPD <0.03 per th >94% per asn

1. Memperkuat prosedur perumusan dan penetapan regulasi	1. Inventarisasi regulasi penghambat 2. inventasiasi regulasi tumpang tindih 3. inventarisasi regulasi yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi	PENGUATAN ASPEK DEREGULASI KEBIJAKAN melalui :				
		a. Penurunan jumlah regulasi penghambat dari Total Produk Hukum Daerah (TPHD)	SETDAKO	<5% TPHD	<4% TPHD	<3% TPHD
		b. Penurunan jumlah regulasi tumpang tindih per tahun	SETDAKO	<5% TPHD	<4% TPHD	<3% TPHD
		c. Penurunan jumlah regulasi yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi	SETDAKO	<5% TPHD	<4% TPHD	<3% TPHD
1. Optimalisasi Penataan dan Penguatan Kelembagaan	1. Penataan dan evaluasi kelembagaan menuju tepat ukuran 2. Penataan dan evaluasi kelembagaan menuju tepat fungsi	a. Terbentuknya kelembagaan OPD tepat ukuran	SETDAKO DAN BKD(2022), BKPSDM(2023-2026)	100%	100%	100%
		b. Terbentuknya kelembagaan OPD tepat fungsi	SETDAKO DAN BKD (2022), BKPSDM (2023-2026)	100%	100%	100%
1. Mewujudkan ketatalaksanaan Organisasi yang berkualitas dan efektif dalam kinerja	1. Penyediaan dukungan Digitalisasi Birokrasi 2. Kepatuhan pemanfaatan procurement 3. Mewujudkan	a. Perbaikan peringkat SPBE	DISKOMINFO DAN OPD	1,67	2.5	3.00
		b. Perbaikan Peringkat Indeks Tata Kelola Barjas	SETDAKO DAN OPD	5,51	55	60
		c. Penguatan capaian	OPD	74,03	84	86

3. Mewujudkan.....

	Sistem Kerja yang efektif dan efisien	Survei Internal Organisasi d. Penguatan Capaian kualitas pengelolaan aset e. Penguatan capaian kualitas pengelolaan Anggaran	PELAYANAN BPKAD BPKAD	3.5 95	3.6 96	3.7 97
1. Penguatan Sistem Manajemen SDM	1. Peningkatan upaya profesionalisme ASN 2. Peningkatan upaya penjenjangan dan pola karir ASN secara terbuka, akuntabel dan professional	a. Perbaiki Indeks profesionalisme ASN b. Perbaiki Peringkat Indeks Merit System	BKD (2022), BKPSDM (2023-2026) DAN OPD BKD (2022), BKPSDM (2023-2026) DAN OPD	32,71 87,5	50 200	60 250
RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Perbaikan Indeks-Indeks Kapabilitas yang dikoordinir OPD yang melaksanakan kewenangan terkait. • Membentuk rencana Kerja Tim Gugus Tugas Kapabilitas. • Melaksanakan rencana kerja Tim Gugus Tugas secara terukur dan didukung kertas kerja • Memonitor capaian kerja Tim Gugus Tugas Kapabilitas secara berkala. • Memperbaiki sistem kerja Kelompok Kerja Area Akuntabilitas. • Meningkatkan kinerja instansi pemerintah; • Menurunkan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang undangan • Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang- undangan kementerian; • Menurunkan kebijakan yang menghambat efektivitas kinerja organisasi, iklim investasi/perizinan/kemudahan berusaha dan sistem pelayanan publik • Menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal organisasi; • Meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi; <ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan desain organisasi yang mendukung kinerja; 					

	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi/menyederhanakan jenjang organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja • Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan • Menciptakan pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara regional dan nasional; • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan; • Meningkatkan kinerja organisasi dengan penyediaan metode kerja modern • Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada Pemerintah Kota; • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur ; • Meningkatkan disiplin SDM Aparatur • Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur • Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 4.9.....

TABEL 4.9
CASCADING REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BINJAI LEVEL MESO 2022-2024
PADA SASARAN 03

TUJUAN PELAKSANAAN SASARAN 03		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE) SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA (SEJALAN DENGAN MISI III RPJMD) TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA KEPADA MASYARAKAT					
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA KERJA 8 AREA PERUBAHAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
1. Peningkatan Upaya kepatuhan terhadap Standar Pelayanan 2. Pemenuhan standar prasarana dan sarana dalam pelayanan publik. 3. Penyediaan penyelenggara pelayanan yang profesional	1. Peningkatan intensitas sosialisasi terhadap standar pelayanan 2. Pemantauan Kepatuhan penerapan standar pelayanan 3. Perbaikan dukungan Penyediaan sarpras pelayanan yang terstandar 4. Peningkatan Upaya pelaksanaan pendidikan dan keterampilan penyelenggara pelayanan	PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK melalui : a. Perbaikan peringkat indeks pelayanan publik	SETDAKO DAN OPD PELAYANAN	2,40	3.9	4.1	4.3
		b. Kepatuhan terhadap Standard Pelayanan Publik	SETDAKO DAN OPD PELAYANAN	62,12	83	85	87
		c. Perbaikan peringkat indeks persepsi kualitas pelayanan Publik	SETDAKO DAN OPD PELAYANAN	74,50	87	89	91
RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Perbaikan Indeks-Indeks Pelayanan Publik yang 						

Rencana Aksi.....

dikoordinir OPD yang melaksanakan kewenangan terkait.

- Membentuk rencana Kerja Tim Gugus Tugas Pelayanan Publik.
- Melaksanakan rencana kerja Tim Gugus Tugas Indeks Pelayanan Publik secara terukur dan didukung dengan kertas kerja
- Memonitor capaian Kerja Tim Gugus Tugas Indeks Pelayanan Publik secara berkala.
- Memperbaiki sistem kerja Kelompok Kerja Area Pelayanan Publik.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
- Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional
- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
- Menyediakan teknologi informasi dalam sistem pelayanan yang memadai dan terintegrasi
- Menyediakan penyelenggara pelayanan yang profesional
- Menyediakan prosedur baku sistem pengelolaan layanan dan aduan
- Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam sistem pelayanan
- Peningkatan intensitas pelatihan penyelenggara pelayanan
- Penguatan sanksi pelanggaran standar pelayanan
- Evaluasi berkelanjutan terhadap mutu standar pelayanan
- Penetapan kriteria penyelenggara layanan profesional
- Penetapan standar kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan

F.Quick Wins.....

F. QUICK WINS

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah tindakan atau aktivitas yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan rencana kerja dan rencana aksi pemerintah Kota Binjai dan Segenap Perangkat Daerah dalam mempercepat tercapainya indikator indikator sasaran melalui percepatan perbaikan kinerja delapan area perubahan.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di Pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, daerah harus menetapkan penyederhanaan Birokrasi sebagai *Quick Wins* utama. Penyederhanaan Birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian, Pemerintah Kota Binjai memandang perlu menyejajarkan tersedianya dan terlaksananya Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pemenuhan peta proses bisnis dan pohon kinerja serta melaksanakan indeks indeks yang sudah harus dilaksanakan

Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Binjai menetapkan *Quick Wins*, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Berikut ini disajikan tabel strategi *quick win* yang selaras dengan seluruh elemen kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Binjai selama periode ketiga pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024

TABEL 4.10
QUICK WINS 5 (LIMA) TAHUN KETIGA PEMERINTAH KOTA BINJAI
2022-2024

TAHUN	STRATEGI QUICK WIN	TARGET KONDISI	DAMPAK TERUNGKIT
2022			
SASARAN REFORMASI BIROKRASI 01 : BIROKRASI BERSIH DAN AKUNTABEL			
	Percepatan perbaikan skor aspek pemenuhan pada level perangkat daerah menuju capaian >95% dari total bobot.	>95% dari bobot	Capaian skor aspek pemenuhan dalam LKE Gabungan akan meningkat.

Percepatan.....

	Percepatan upaya perbaikan indeks kapabilitas APIP dan maturitas SPIP	Meningkat sesuai target 2022	Capaian hasil antara dan komponen hasil
SASARAN REFORMASI BIROKRASI 02 : BIROKRASI YANG KAPABEL			
	Percepatan perbaikan skor aspek pemenuhan pada level perangkat daerah menuju capaian >95% dari total bobot.	>95% dari bobot	Capaian skor aspek pemenuhan dalam LKE Gabungan akan meningkat.
	Percepatan upaya perbaikan indeks : <ul style="list-style-type: none"> • Profesionalisme ASN • Indeks Tata kelola Barang Jasa • SPBE • Kualitas pengelolaan aset • Indeks indeks lainnya 	Meningkat sesuai target 2022	Capaian hasil antara dan komponen hasil
	Perbaikan dan penguatan sistem kerja Tim Pelaksana, Pokja RB Daerah dan Pokja RB Unit melalui pola PDCA (<i>Plan-Do-Chek-Act</i>)	Terpenuhi target kerja	Akurasi perkembangan capaian Reformasi Birokrasi dan terpenuhinya basis data akurat pengisian LKE
SASARAN REFORMASI BIROKRASI 03 : BIROKRASI BERPELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS			
	Percepatan perbaikan skor aspek pemenuhan pada level perangkat daerah menuju capaian >95% dari total bobot.	>95% dari bobot	Capaian skor aspek pemenuhan dalam LKE Gabungan akan meningkat.
	Percepatan upaya perbaikan indeks Pelayanan Publik	Meningkat sesuai target 2022	Capaian hasil antara dan komponen hasil

TAHUN	STRATEGI QUICK WIN	TARGET KONDISI	DAMPAK TERUNGKIT
2023-2024			
SASARAN REFORMASI BIROKRASI 01 : BIROKRASI BERSIH DAN AKUNTABEL			
	Percepatan perbaikan skor aspek pemenuhan pada level perangkat daerah menuju capaian >98% dari total bobot.	>98% dari bobot	Capaian skor aspek pemenuhan dalam LKE Gabungan akan meningkat.
	Percepatan upaya perbaikan indeks kapabilitas APIP dan maturitas SPIP	Meningkat sesuai target 2023 dan 2024	Capaian hasil antara dan komponen hasil

SASARAN.....

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 02 : BIROKRASI YANG KAPABEL			
	Percepatan perbaikan skor aspek pemenuhan pada level perangkat daerah menuju capaian >98% dari total bobot.	>98% dari bobot	Capaian skor aspek pemenuhan dalam LKE Gabungan akan meningkat.
	Percepatan upaya perbaikan indeks : <ul style="list-style-type: none"> • Profesionalisme ASN • Indeks Tata kelola Barang Jasa • SPBE • Kualitas pengelolaan aset • Indeks indeks lainnya 	Meningkat sesuai target 2023 dan 2024	Capaian hasil antara dan komponen hasil
	Penyediaan aplikasi Reformasi Birokrasi yang terintegrasi dengan model LKE	Digitalisasi informasi RB	Tim Pengarah-Pokja dapat mengikuti dan melaporkan pelaksanaan RB secara <i>real time</i> dan terintegrasi.
SASARAN REFORMASI BIROKRASI 03 : BIROKRASI BERPELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS			
	Percepatan perbaikan skor aspek pemenuhan pada level perangkat daerah menuju capaian >95% dari total bobot.	>95% dari bobot	Capaian skor aspek pemenuhan dalam LKE Gabungan akan meningkat.
	Percepatan upaya perbaikan indeks Pelayanan Publik	Meningkat sesuai target 2023 dan 2024	Capaian hasil antara dan komponen hasil

BAB V.....

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka mendukung target pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja dan rencana aksi secara maksimal, diperlukan pembentukan tim pelaksana Reformasi Birokrasi pada level daerah dan Unit Kerja/ Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi yang jelas dan terukur. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tatanan Pemerintah Daerah, Penyelenggara agenda Reformasi Birokrasi meliputi Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja sesuai Area Perubahan yang penetapannya dituangkan melalui Keputusan Walikota Kota Binjai. Di sisi lain sebagai pelaksana agenda Reformasi Birokrasi pada level unit/ perangkat daerah dapat berupa kelompok kerja Reformasi Birokrasi unit yang penetapannya dilaksanakan melalui Keputusan Kepala Perangkat daerah bersangkutan.

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA

Pada tahap implementasi, setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level Pemerintah Kota Binjai dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program Reformasi Birokrasi Daerah telah dilaksanakan secara sistematis, terpadu dan terkoordinasi serta komprehensif oleh semua Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Binjai. Berikut disajikan uraian Tugas Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Kota Binjai:

1. Tim Pengarah yang memiliki Tugas:
 - a. Memberikan arah dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi sertakan menetapkan *Road Map*.
 - b. Memastikan pelaksaaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat.
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

Tim Pengarah.....

Tim Pengarah sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Walikota Kota Binjai selaku Ketua
- b. Wakil Walikota Kota Binjai selaku Wakil Ketua
- c. Sekretaris Daerah Kota Binjai selaku Sekretaris Tim Pengarah

2. Tim Pelaksana, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana Reformasi Birokrasi sesuai peta jalan (*Road Map*) Pemerintah Kota Binjai.
- b. Mengkoordinasikan dan mengembangkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai.
- c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada unit/satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai.
- d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai.
- e. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai.
- f. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Walikota Binjai.

Tim pelaksana sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah Kota Binjai selaku Ketua Tim Pelaksana.
- b. Asisten Administrasi Umum Setdako. Binjai selaku Sekretaris Tim Pelaksana.
- c. Kepala Bagian Organisasi Setdako. Binjai selaku Wakil Sekretaris.
- d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako. Binjai sebagai anggota.
- e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako. sebagai Anggota.
- f. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai anggota.

3. Kelompok Kerja (POKJA) mempunyai tugas yaitu :

- a. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.
- b. Jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, maka unit kerja Bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*.
- c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya.

d. Melaporkan.....

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Kelompok Kerja (POKJA) Mental Aparatur dan Sumber Daya Manusia Aparatur setidaknya terdiri dari:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai selaku Ketua
- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai sebagai Anggota
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai sebagai Anggota
- d. Kepala Bagian Pemerintah Setdako. Binjai sebagai Anggota
- e. Kepala Bagian Protokol Setdako. Binjai sebagai Anggota

Kelompok Kerja (POKJA) Akutanbilitas setidaknya terdiri dari:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai selaku Ketua
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai sebagai Anggota
- c. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Binjai sebagai Anggota
- d. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Setdako. Binjai sebagai Anggota
- e. Kepala Bagian Pembangunan Setdako. Binjai sebagai Anggota
- f. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdako. Binjai sebagai Anggota

Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan setidaknya terdiri dari:

- a. Inspektur Kota Binjai selaku Ketua
- b. Unsur Inspektorat Daerah Kota Binjai sebagai Anggota

Kelompok Kerja (POKJA) Kerja Kelembagaan dan Tatalaksana setidaknya terdiri dari:

- a. Kepala Bagian Organisasi Setdako. Binjai selaku Ketua
- b. Para Kepala Sub Bagian Pada Bagian Organisasi Setdako. Binjai sebagai Anggota

Kelompok Kerja (POKJA) Peraturan Perundang-Undangan setidaknya terdiri dari:

- a. Kepala Bagian Hukum Setdako. Binjai selaku Ketua

b. Sekretaris.....

- b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai sebagai Anggota
- c. Para Kepala Sub Bagian Pada Bagian Hukum Setdako. Binjai sebagai Anggota

Kelompok Kerja (POKJA) Pelayanan Publik setidaknya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Kota Binjai selaku Ketua
- b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai Anggota
- c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagai Anggota
- d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sebagai Anggota
- e. Kepala Bagian Perekonomian Setdako. Binjai sebagai Anggota
- f. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako. Binjai sebagai Anggota

Berikut ini disajikan uraian tugas masing masing kelompok kerja pada unit Perangkat Daerah dalam pelaksanaan agenda reformasi sesuai area perubahan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok kerja mempedomani konsep kerja yang meliputi :

- a. **Plan (P)** yaitu merencanakan setiap rencana kerja dengan baik
- b. **Do (D)** yaitu melaksanakan rencana kerja sesuai prosedur /acuan kerja
- c. **Chek (C)** yaitu memantau perkembangan target kerja
- d. **Act (A)** yaitu melakukan penyesuaian dan perbaikan berkala

Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi pada unit kerja/perangkat daerah sekurang kurangnya terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Penanggungjawab
- b. Sekretaris Perangkat Daerah selaku Ketua Pokja
- c. Para Kepala Bidang/Bagian selaku anggota.
- d. Dan dapat dibantu oleh pelaksana pada jenjang manajemen dibawahnya.

1. POKJA.....

1 POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN		
	TUGAS	TARGET KINERJA
P	Menyusun Rencana kerja peningkatan kualitas area mempedomani setiap unsur dalam manajemen perubahan	Tersedianya rencana kerja
D	Melaksanakan rencana kerja peningkatan kualitas area berdasarkan aspek dalam manajemen perubahan	Terlaksananya rencana kerja sesuai jadwal
C	Menyiapkan langkah-langkah/prosedur kerja tertulis untuk setiap aspek dalam area manajemen perubahan	Tersedianya langkah/prosedur kerja untuk setiap aspek secara tertulis sebagai panduan kerja
	Menyiapkan kertas kerja pendukung pelaksanaan rencana kerja didukung bukti bukti hasil kerja yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kerja	Tersedianya kertas kerja pendukung pelaksanaan kerja disertai bukti kerja
	Mengelola bukti pendukung capaian pelaksanaan area manajemen perubahan sebagai bahan laporan	Tersedianya bukti pendukung capaian aspek
A	Melakukan <i>monitoring</i> secara berkala dan melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja atas perkembangan dan capaian pelaksanaan agenda kerja pada manajemen perubahan	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan laporan hasil <i>monitoring</i>
	Melaksanakan dan mengawasi tindak lanjut umpan balik atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja manajemen perubahan dari unit penanggungjawab/pelaksana	Terlaksananya proses tindaklanjut atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja yang diperlukan

2 POKJA DEREGULASI KEBIJAKAN		
	TUGAS	TARGET KINERJA
P	Menyusun Rencana kerja peningkatan kualitas area mempedomani setiap unsur dalam area deregulasi kebijakan	Tersedianya rencana kerja
D	Melaksanakan rencana kerja peningkatan kualitas area berdasarkan aspek dalam area deregulasi kebijakan.	Terlaksananya rencana kerja sesuai jadwal
C	Menyiapkan langkah-langkah/prosedur kerja tertulis untuk setiap aspek dalam area deregulasi kebijakan	Tersedianya langkah/prosedur kerja untuk setiap aspek secara tertulis sebagai panduan kerja
	Menyiapkan kertas kerja pendukung pelaksanaan rencana kerja didukung bukti bukti hasil kerja yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kerja	Tersedianya kertas kerja pendukung pelaksanaan kerja disertai bukti kerja
	Mengelola bukti pendukung capaian pelaksanaan area deregulasi kebijakan sebagai bahan laporan	Tersedianya bukti pendukung capaian aspek
A	Melakukan <i>monitoring</i> secara berkala dan melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja atas perkembangan dan capaian pelaksanaan agenda kerja pada area deregulasi kebijakan.	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan laporan hasil <i>monitoring</i>
	Melaksanakan dan mengawasi tindak lanjut umpan balik atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja pada area deregulasi kebijakan dari unit penanggungjawab/pelaksana	Terlaksananya proses tindaklanjut atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja yang diperlukan

3. POKJA.....

3 POKJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		
	TUGAS	TARGET KINERJA
P	Menyusun Rencana kerja peningkatan kualitas area mempedomani setiap unsur dalam penataan organisasi	Tersedianya rencana kerja
D	Melaksanakan rencana kerja peningkatan kualitas area berdasarkan aspek dalam area penataan organisasi	Terlaksananya rencana kerja sesuai jadwal
C	Menyiapkan langkah-langkah/prosedur kerja tertulis untuk setiap aspek dalam area penataan organisasi	Tersedianya langkah/prosedur kerja untuk setiap aspek secara tertulis sebagai panduan kerja
	Menyiapkan kertas kerja pendukung pelaksanaan rencana kerja didukung bukti-bukti hasil kerja yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kerja	Tersedianya kertas kerja pendukung pelaksanaan kerja disertai bukti kerja
	Mengelola bukti pendukung capaian pelaksanaan area penataan organisasi sebagai bahan laporan	Tersedianya bukti pendukung capaian aspek
A	Melakukan <i>monitoring</i> secara berkala dan melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja atas perkembangan dan capaian pelaksanaan agenda kerja pada area penataan organisasi	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan laporan hasil <i>monitoring</i>
	Melaksanakan dan mengawasi tindak lanjut umpan balik atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja penataan organisasi dari unit penanggungjawab/pelaksana	Terlaksananya proses tindaklanjut atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja yang diperlukan

4 POKJA PENATAAN TATA LAKSANA		
	TUGAS	TARGET KINERJA
P	Menyusun Rencana kerja peningkatan kualitas area mempedomani setiap unsur dalam penataan tata laksana	Tersedianya rencana kerja
D	Melaksanakan rencana kerja peningkatan kualitas area berdasarkan aspek dalam penataan tata laksana	Terlaksananya rencana kerja sesuai jadwal
C	Menyiapkan langkah-langkah/prosedur kerja tertulis untuk setiap aspek dalam area penataan tata laksana	Tersedianya langkah/prosedur kerja untuk setiap aspek secara tertulis sebagai panduan kerja
	Menyiapkan kertas kerja pendukung pelaksanaan rencana kerja didukung bukti-bukti hasil kerja yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan	Tersedianya kertas kerja pendukung pelaksanaan kerja disertai bukti kerja
	Mengelola bukti pendukung capaian pelaksanaan area penataan tata laksana sebagai bahan laporan	Tersedianya bukti pendukung capaian aspek
A	Melakukan <i>monitoring</i> secara berkala dan melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja atas perkembangan dan capaian pelaksanaan agenda kerja pada penataan tata laksana	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan laporan hasil <i>monitoring</i>
	Melaksanakan dan mengawasi tindak lanjut umpan balik atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja manajemen perubahan dari unit penanggungjawab/pelaksana	Terlaksananya proses tindaklanjut atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja yang diperlukan

5. POKJA.....

5 POKJA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
	TUGAS	TARGET KINERJA
P	Menyusun Rencana kerja peningkatan kualitas area mempedomani setiap unsur dalam penataan manajemen sumber daya manusia	Tersedianya rencana kerja
D	Melaksanakan rencana kerja peningkatan kualitas area berdasarkan aspek dalam manajemen sumber daya manusia	Terlaksananya rencana kerja sesuai jadwal
C	Menyiapkan langkah-langkah/prosedur kerja tertulis untuk setiap aspek dalam area manajemen sumber daya manusia	Tersedianya langkah/prosedur kerja untuk setiap aspek secara tertulis sebagai panduan kerja
	Menyiapkan kertas kerja pendukung pelaksanaan rencana kerja didukung bukti-bukti hasil kerja yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kerja	Tersedianya kertas kerja pendukung pelaksanaan kerja disertai bukti kerja
	Mengelola bukti pendukung capaian pelaksanaan area manajemen sumber daya manusia sebagai bahan laporan	Tersedianya bukti pendukung capaian aspek
A	Melakukan <i>monitoring</i> secara berkala dan melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja atas perkembangan dan capaian pelaksanaan agenda kerja pada manajemen sumber daya manusia	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan laporan hasil <i>monitoring</i>
	Melaksanakan dan mengawasi tindak lanjut umpan balik atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja manajemen sumber daya manusia dari unit penanggungjawab/pelaksana	Terlaksananya proses tindaklanjut atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja yang diperlukan

6 POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS		
	TUGAS	TARGET KINERJA
P	Menyusun Rencana kerja peningkatan kualitas area mempedomani setiap unsur dalam penguatan akuntabilitas	Tersedianya rencana kerja
D	Melaksanakan rencana kerja peningkatan kualitas area berdasarkan aspek dalam penguatan akuntabilitas	Terlaksananya rencana kerja sesuai jadwal
C	Menyiapkan langkah-langkah/prosedur kerja tertulis untuk setiap aspek dalam area penguatan akuntabilitas	Tersedianya langkah/prosedur kerja untuk setiap aspek secara tertulis sebagai panduan kerja
	Menyiapkan kertas kerja pendukung pelaksanaan rencana kerja didukung bukti-bukti hasil kerja yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kerja	Tersedianya kertas kerja pendukung pelaksanaan kerja disertai bukti kerja
	Mengelola bukti pendukung capaian pelaksanaan area penguatan akuntabilitas sebagai bahan laporan	Tersedianya bukti pendukung capaian aspek
A	Melakukan <i>monitoring</i> secara berkala dan melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja atas perkembangan dan capaian pelaksanaan agenda kerja pada area penguatan akuntabilitas	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan laporan hasil <i>monitoring</i>
	Melaksanakan dan mengawasi tindak lanjut umpan balik atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja penguatan akuntabilitas dari unit penanggungjawab/pelaksana	Terlaksananya proses tindaklanjut atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja yang diperlukan

7. POKJA.....

7 POKJA PENGUATAN PENGAWASAN		
	TUGAS	TARGET KINERJA
P	Menyusun Rencana kerja peningkatan kualitas area mempedomani setiap unsur dalam area penguatan pengawasan	Tersedianya rencana kerja
D	Melaksanakan rencana kerja peningkatan kualitas area berdasarkan aspek dalam area penguatan pengawasan	Terlaksananya rencana kerja sesuai jadwal
C	Menyiapkan langkah langkah/prosedur kerja tertulis untuk setiap aspek dalam area penguatan pengawasan	Tersedianya langkah/prosedur kerja untuk setiap aspek secara tertulis sebagai panduan kerja
	Menyiapkan kertas kerja pendukung pelaksanaan rencana kerja didukung bukti bukti hasil kerja yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kerja	Tersedianya kertas kerja pendukung pelaksanaan kerja disertai bukti kerja
	Mengelola bukti pendukung capaian pelaksanaan area penguatan pengawasan sebagai bahan laporan	Tersedianya bukti pendukung capaian aspek
A	Melakukan <i>monitoring</i> secara berkala dan melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja atas perkembangan dan capaian pelaksanaan agenda kerja pada penguatan pengawasan	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan laporan hasil <i>monitoring</i>
	Melaksanakan dan mengawasi tindak lanjut umpan balik atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja penguatan pengawasan dari unit penanggungjawab/pelaksana	Terlaksananya proses tindaklanjut atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja yang diperlukan

8 POKJA PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS		
	TUGAS	TARGET KINERJA
P	Menyusun Rencana kerja peningkatan kualitas area mempedomani setiap unsur dalam area penguatan pelayanan publik	Tersedianya rencana kerja
D	Melaksanakan rencana kerja peningkatan kualitas area berdasarkan aspek dalam area penguatan pelayanan publik	Terlaksananya rencana kerja sesuai jadwal
C	Menyiapkan langkah langkah/prosedur kerja tertulis untuk setiap aspek dalam area penguatan pelayanan publik	Tersedianya langkah/prosedur kerja untuk setiap aspek secara tertulis sebagai panduan kerja
	Menyiapkan kertas kerja pendukung pelaksanaan rencana kerja didukung bukti bukti hasil kerja yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kerja	Tersedianya kertas kerja pendukung pelaksanaan kerja disertai bukti kerja
	Mengelola bukti pendukung capaian pelaksanaan area penguatan kualitas pelayanan publik sebagai bahan laporan	Tersedianya bukti pendukung capaian aspek
A	Melakukan <i>monitoring</i> secara berkala dan melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja atas perkembangan dan capaian pelaksanaan agenda kerja pada penguatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan laporan hasil <i>monitoring</i>
	Melaksanakan dan mengawasi tindak lanjut umpan balik atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja area penguatan kualitas pelayanan publik dari unit penanggungjawab/pelaksana	Terlaksananya proses tindaklanjut atas hasil capaian pelaksanaan agenda kerja yang diperlukan

B. MONITORING.....

B. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Binjai wajib diperlukan untuk mengukur perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara periodik. *Monitoring* juga dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses *monitoring*, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam *Grand Road Map* Reformasi Birokrasi.
- b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk dan Pertemuan rutin pada tingkat Tim Kelompok Kerja Perangkat Daerah / Unit untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- c. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- d. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
- e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah yang kemudian hasilnya dilaporkan ke tim pengarah Reformasi Birokrasi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil *monitoring* yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran dan tahunan di tingkat tim pelaksana Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan organisasi perangkat daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke

depan.....

depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;

- b. Evaluasi semester dan tahunan juga dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja sebagai bahan masukan bagi tim pelaksana dalam melakukan evaluasi tahunan.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari :

- a. Hasil-hasil *monitoring*;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
- c. Analisa faktor faktor yang mempengaruhi indikator hasil antara dan komponen hasil
- d. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah / Tim Penilai Internal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi disetiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENDANAAN

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* mampu dibiayai melalui penganggaran setiap instansi dan unit kerja. Pendanaan yang cukup dibutuhkan oleh koordinator Reformasi Birokrasi (bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai) mempedomani target kinerja yang merupakan indikator kinerja utama daerah dan membutuhkan koordinasi dan konsolidasi kerja dengan semua perangkat daerah. Upaya-upaya pendanaan atas semua

rencana.....

rencana kegiatan dan rencana kerja pendukung agenda perbaikan kualitas Reformasi Birokrasi merupakan syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

D. SINKRONISASI DENGAN RENCANA STRATEGIS

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi setiap kementerian/lembaga/Pemerintah daerah untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan instansi. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya oleh instansi yang berperan dan bertanggungjawab di level mikro.

BAB VI.....

BAB VI PENUTUP

Road Map pada akhirnya akan digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Binjai. Kepatuhan penggunaan *Road Map* ini sangat tergantung pada komitmen dan dukungan dari segenap Jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Komitmen merupakan faktor utama keberhasilan pencapaian target perbaikan indeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.

Pemahaman yang memadai atas pentingnya Reformasi Birokrasi oleh Kepala Daerah dan Para Kepala Perangkat Daerah yang didukung segenap penyelenggara pemerintahan menjadi kebutuhan mendasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih berhasil. Melalui ketersediaan *Road Map* Pemerintah Kota Binjai periode 2022-2024 dapat menjadi dasar dan arah perjalanan Reformasi Birokrasi yang lebih baik agar sasaran Reformasi Birokrasi dapat terwujud. Semoga dengan *Road Map* ini, agenda Reformasi Birokrasi Kota Binjai menjadi lebih terarah dan terukur sebagai langkah menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH